



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TAHUN 2024**



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HORTIKULTURA
TAHUN 2024



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah, penanganan produk hortikultura harus dimulai dari hulu sampai hilir dengan baik melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) hingga *Good Distribution Practices* (GDP). Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dimulai dari kegiatan penanganan pascapanen agar produk tidak mudah rusak dan memperpanjang umur simpan, dilanjutkan dengan pengolahan produk untuk menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah produk. Peningkatan mutu dan daya saing produk yang didukung dengan program sekolah lapang GAP dan GHP bagi kelompok tani, sertifikasi produk, dan registrasi lahan usaha hortikultura, serta kegiatan di hilir yakni pemasaran produk yang diarahkan pada pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, pemenuhan kebutuhan domestik, substitusi impor serta peningkatan ekspor.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memiliki peran dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura melalui kegiatan fasilitasi pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura yang didukung melalui sistem standarisasi dan mutu. Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat PPHH. Capaian RKT Tahun 2024 diukur melalui indikator kinerja, yaitu 1) Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang Sesuai Peruntukkan, 2) Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura, 3) Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura, 4) Peningkatan Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura, dan 5) Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional. Sehubungan dengan pencapaian RKT Direktorat PPHH tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan rincian realisasi sebagai berikut, fasilitasi sarana pascapanen 522 unit; sarana pengolahan 184 unit, prasarana pascapanen 184 unit, prasarana pengolahan 20 unit; Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura 1.327 produk; sertifikat produk 32 unit (sertifikat produk segar 22 unit, olahan 10 unit); Kelompok Tani terlatih GAP 110 kelompok masyarakat, Kelompok Tani terlatih GHP 40 kelompok masyarakat; Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan 85 Kegiatan; Promosi Produk Hortikultura 5 Promosi; Peraturan/Norma/Pedoman 1 NSPK; Informasi Pasar Komoditas Hortikultura 205 Layanan; Sarana Pemasaran 30 Unit; dan *Horticulture Development of Dryland Areas Project* 1 unit.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat PPHH menunjukkan bahwa 1) Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang Sesuai

Peruntukkan mencapai 88,78%, 2) Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura mencapai 5,08%, 3) Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura senilai 544.994.031 US\$, 4) Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura sebesar 75%; 5) Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional sebesar 31,26%; 6) Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH sebesar 75%; dan 7) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 3,27 Skala Likert. Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura berjumlah Rp 125.811.622.000,-. Pagu anggaran tersebut mengalami blokir dengan total Rp. 17.122.250.000,-. Total realisasi anggaran kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura pusat dan daerah adalah sebesar Rp. 107.723.448.784,- atau 85,62% dari pagu, apabila memperhitungkan blokir realisasi anggaran mencapai 99,11%. Hasil pengukuran terhadap efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian realisasi output Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 adalah sebesar 18,49% dengan nilai efisiensi sebesar 96,23%. Sedangkan apabila memperhitungkan adanya blokir, hasil pengukuran terhadap efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian realisasi output Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 adalah sebesar 8,56% dengan nilai efisiensi sebesar 71,39%.

KATA PENGANTAR

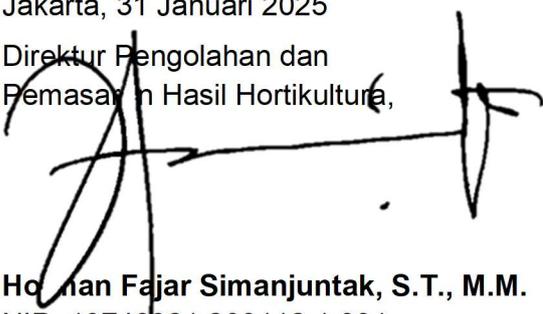
Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja secara menyeluruh selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2024. Berbagai masalah dan hambatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Capaian target kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura tahun 2024 sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami atas mandat yang diemban; kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura serta bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura,



H. Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
NIP. 19740921 200112 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIFI	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia	3
1.4. Dukungan Anggaran	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024	5
2.1.1. Visi	5
2.1.2. Misi	5
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	6
2.1.4. Strategi	7
2.1.5. Arah Kebijakan	7
2.1.6. Program dan Kegiatan	11
2.1.7. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	14
2.1.8. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.1.9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
2.1.10. Perjanjian Kinerja (PK)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
1. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	25
2. Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	35
3. Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	41
4. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	42
3.2. Realisasi Anggaran	44
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	51
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	15
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2024	15
Tabel 3.	Rencana Kinerja Tahunan revisi 1 (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura T.A. 2024	16
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Desember 2023)	17
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-1 Februari 2024)	18
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-2 Juli 2024)	18
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-3 Agustus 2024)	19
Tabel 8.	Struktur Anggaran Direktorat PPHH berdasarkan Output T.A. 2024	20
Tabel 9.	Struktur Anggaran Direktorat PPHH berdasarkan Kewenangan Pusat dan Daerah T.A. 2024	21
Tabel 10.	Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat PPHH	22
Tabel 11.	Perbandingan Target Kinerja Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	23
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	24
Tabel 13.	Realisasi Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang sesuai peruntukkan (Satker Pusat dan Daerah)	27
Tabel 14.	Sarana & Prasarana Pascapanen Satker Pusat & Daerah TA 2024	28
Tabel 15.	Target, Realisasi Sarana Prasarana Pengolahan T.A. 2024	28
Tabel 16.	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura yang sesuai Peruntukkan	29
Tabel 17.	Realisasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tahun 2021 - 2024	33
Tabel 18.	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura TA 2024	34
Tabel 19.	Anggaran Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tahun 2023 dan 2024	34
Tabel 20.	Nilai Ekspor Hortikultura Tahun 2023 dan Tahun 2024	35
Tabel 21.	Target dan Realisasi Nilai Ekspor Hortikultura Tahun 2024	35
Tabel 22.	Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura Tahun 2024	38
Tabel 23.	Capaian Kinerja Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2023 dan 2024	39
Tabel 24.	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2024	40
Tabel 25.	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2020-2024	40
Tabel 26.	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	41
Tabel 27.	Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata	42
Tabel 28.	Survei kepuasan layanan tata usaha Direktorat PPHH	43
Tabel 29.	Hasil Penilaian atas Layanan Tata Usaha Direktorat PPHH	43
Tabel 30.	Realisasi Anggaran Direktorat PPHH T.A. 2024	44
Tabel 31.	Realisasi Anggaran Direktorat PPHH T.A. 2024	45
Tabel 32.	Realisasi Fisik Direktorat PPHH T.A. 2024	46
Tabel 33.	Kelompok Penerima Fasilitas Sertifikasi HACCP T.A. 2024	48
Tabel 34.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Output Kegiatan Tahun 2024 dengan Mengeluarkan Blokir	52
Tabel 35.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Output Kegiatan Tahun 2024	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura TA. 2024 harus sejalan dengan Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024, Blue Print Pengembangan Hortikultura (2011-2025). Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan usaha hortikultura tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, namun juga pada upaya pengembangan hilirisasinya. Salah satu upaya pengembangan hilirisasi komoditas hortikultura yaitu melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Hortikultura. Upaya penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura didukung melalui fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura secara terpadu. Selain pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas hortikultura juga perlu didukung dengan dukungan pemasaran (*off farm*) serta dukungan penerapan jaminan mutu (*on farm* dan *off farm*). Wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di sentra produksi. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau added value berada di tingkat petani dan kelompok tani/gapoktan.

Penerapan jaminan mutu produk hortikultura dari hulu sampai hilir perlu dilakukan dalam pengembangan usaha hortikultura. Hal tersebut untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah yang dilakukan melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) sampai dengan *Good Distribution Practices* (GDP).

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dimulai dari kegiatan penanganan pascapanen yang ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses lagi. Selain penanganan pascapanen, pengolahan produk hortikultura juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura tersebut.

Pengembangan pengolahan hasil hortikultura dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani/kelompok

tani/home industri, dan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan, serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Standardisasi mutu produk dan kemasan ditujukan untuk menghasilkan produk hortikultura yang aman dikonsumsi, bermutu, dan ramah lingkungan.

Pemasaran komoditas hortikultura merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan subsektor hortikultura. Pemasaran produk hortikultura diarahkan pada pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, pemenuhan kebutuhan domestik, substitusi impor serta peningkatan ekspor. Penguatan jaringan pemasaran melalui penguatan kelembagaan pertanian yang bergerak di bidang pemasaran produk yaitu Pasar Tani dilakukan untuk membantu memasarkan produk hortikultura langsung dari petani/kelompok tani baik segar maupun olahan dengan cara mendekatkan produk yang masih segar dan bermutu ke konsumen.

Beberapa permasalahan produk hortikultura yang mudah rusak (*perishable*) yaitu fluktuatifnya harga disebabkan oleh tidak meratanya produksi komoditas hortikultura (*over supply* dan defisit ketersediaan produk). Menyikapi permasalahan di atas, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran untuk melakukan hal nyata seperti memfasilitasi pembelian produk petani. Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu petani dalam mengatasi melimpahnya produk hortikultura (*over supply*).

Program dan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan berfungsi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada dasar hukum berikut; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan No.19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja

pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Permentan 19 Tahun 2022 pasal 122 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat PPHH dalam rangka mendukung kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 adalah sebanyak 65 orang dengan rincian jumlah PNS/ASN sebanyak 47 orang PPPK sebanyak 8 orang dan THL sebanyak 10 orang. ASN Golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 34 orang dan golongan IV sebanyak 11 orang, sedangkan

untuk PPPK Golongan IX sebanyak 8 orang. Dengan pendidikan S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 26 orang, SMA sebanyak 8 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 29 orang dan perempuan sebanyak 36 orang. Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat PPHH ini tersebar pada masing-masing Kelompok lingkup Direktorat PPHH dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat PPHH dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sebaran pegawai Direktorat PPHH adalah sebagai berikut Direktur 1 orang, Kelompok Pascapanen dan Pengolahan sebanyak 11 orang, Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan sebanyak 9 orang, Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu sebanyak 11 orang, Kelompok Pemasaran Hortikultura sebanyak 13 orang, Kepala Subbagian Tata Usaha sebanyak 1 orang dan Fungsional Umum di Subbag Tata Usaha sebanyak 9 orang, dan THL sebanyak 10 orang.

1.4 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan Direktorat PPHH tingkat pusat dan daerah pada tahun 2024 adalah senilai Rp 125.811.622.000,-. Pagu anggaran tersebut mengalami perubahan total alokasi Pagu dikarenakan adanya realokasi anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp 16.025.000.000,-; Blokir Reguler sebesar Rp 97.250.000,- dan Blokir perjalanan sebesar Rp 1.000.000.000,- sehingga total alokasi Pagu menjadi Rp 108.689.372.000,-.

Pagu anggaran tersebut terdiri dari anggaran yang dialokasikan di pusat senilai Rp 60.540.372.000,- dan di daerah senilai Rp 48.149.000.000,-. Alokasi dana di pusat senilai Rp 60.540.372.000,- dialokasikan untuk (1) Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura (2) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (3) Promosi Produk Hortikultura (4) Peraturan/Norma/Pedoman (5) Sarana Pemasaran Hortikultura (6) Sertifikat Produk Hortikultura (7) Kelompok Tani Terlatih GAP (8) Kelompok Tani Terlatih GHP (9) Sarana Pascapanen Hortikultura (10) Sarana Pengolahan Hortikultura. (11) *Horticulture Development of Dryland Areas Project*. (12) Prasarana Pascapanen Hortikultura (13) Prasarana Pengolahan Hortikultura.

Kegiatan di daerah terdiri atas kegiatan 1) Informasi Pasar Komoditas Hortikultura; 2) Sarana Pascapanen Hortikultura; 3) Sarana Pengolahan Hortikultura; 4) Prasarana Pascapanen Hortikultura; 5) Kelompok Tani Terlatih GAP 8) Kelompok Tani Terlatih GHP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP tersusun atas beberapa komponen, antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:

2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura merumuskan rencana strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura. Renstra dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan sebagai berikut:

2.1.1. Visi

Mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", sedangkan visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah "Agribisnis Hortikultura Berdaya Saing yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia yang Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah "Menjadi Institusi yang Peduli dan Memiliki Komitmen Tinggi untuk Mewujudkan Masyarakat Pertanian Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Melalui Penyelenggaraan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas"

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan komoditas hortikultura berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura
3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan terpercaya

Untuk mencapai Visi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mengemban misi sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya diharapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional.
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.
3. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.
4. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
6. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020-2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional.
3. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura
5. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
6. Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Strategis Direktorat PPHH diselaraskan dengan tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah, Florikultura)
2. Penumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Hortikultura
3. Digitalisasi Pertanian

2.1.4. Strategi

1. Penerapan dan pengawasan standar mutu komoditi strategis dan keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian.
3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis.

2.1.5. Arah Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPHH, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ditetapkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sarana, dan memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk hortikultura untuk siap jual.

Dalam penanganan pascapanen komoditas hortikultura, secara umum meliputi kegiatan mulai dari pendataan jumlah produk siap panen, pengumpulan, sortasi, trimming, pembersihan, penirisan, pengkelasan (grading), pengemasan atau pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sampai cara pengiriman dan distribusinya. Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan sarana dan prasarana pascapanen yang memadai seperti bangsal pasca panen, cold storage dan perlengkapannya, alat pengangkutan dari lahan usaha ke packinghouse, dan lain-lain.

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk klaster (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan klaster, dimana kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pengembangan agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya usaha-usaha agroindustri pedesaan yang responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk: (1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; (2) memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.

Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil hortikultura, serta telah memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik (zero waste). Usaha agroindustri tersebut merupakan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil-menengah dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan, minuman, biofarmaka, bioenergy, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini dikembangkan dengan tujuan: meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis; mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.

2. Kebijakan Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu. Kebijakan standardisasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura dari proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan standar mutu secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus

dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sistem berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standarisasi dan mutu dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan pendampingan penerapan standar mutu. Pelaksanaan kegiatan penerapan standar mutu tersebut berupa registrasi kebun dan lahan usaha, penerapan GAP, penerapan GHP, dan standarisasi produk (Sertifikasi Produk Hortikultura).

3. Kebijakan Pemasaran

Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk hortikultura Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di seluruh propinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran dan investasi dilaksanakan dengan pengembangan jaringan pemasaran domestik, pengembangan sarana pemasaran melalui pasar tani dan/atau pasar lelang, kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi pasar.

PIP bertujuan untuk menciptakan sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar.

Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Di samping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan

adalah peningkatan negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan diseminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar komoditi segar/ produk olahan ekspor, pengembangan market intelligence dan database dan penguatan rantai pasok.

2.1.6. Program dan Kegiatan

Program

Program Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jenderal Hortikultura mendukung 3 (tiga) program utama yaitu “Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas”, “Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dan “Program Dukungan Manajemen”.Terkait dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendukung salah satu program yaitu “Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”.

Kegiatan

1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura

Menurut survei Bank Indonesia (BI), hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertanian yang masih tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19, yaitu sebesar 16,7 persen di akhir 2020. Sementara, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi (-17,9 persen), perdagangan (-3,2 persen), real estate (13,0 persen), dan jasa kemasyarakatan (2,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor UMKM pertanian terbuka lebar, salah satunya subsektor hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor. Program penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar off-grade atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Fasilitasi bantuan tersebut berupa Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura dalam bentuk bangunan bangsal pascapanen, dan untuk beberapa komoditas dapat dilengkapi dengan bangunan pengering tenaga surya/solar dryer. Dalam konsep pengembangan UMKM, bangunan bangsal pascapanen mencakup area penanganan pascapanen hortikultura segar dan area pengolahan produk hortikultura.

Bangunan bangsal pascapanen akan dilengkapi dengan sarana/alat pascapanen yang ditujukan untuk mendukung penanganan pascapanen produk segar dan penanganan produk yang akan diolah. Sarana pascapanen dapat berupa sarana angkutan (motor roda 3, angkutan roda 4), keranjang panen, sarana pencucian, roller conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, meja peniris, meja sortasi/packing, dan lain-lain.

Bangunan bangsal pascapanen juga dilengkapi dengan sarana/alat pengolahan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hortikultura serta penanganan produk segar pada saat over supply. Sarana pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah sesuai komoditas yang akan diolah dengan sudah ditentukan jenis end product hasil olahannya.

2. Kegiatan Pemasaran

Pengembangan pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga dan akses pasar luar negeri untuk meningkatkan ekspor. Beberapa kebijakan yang sudah ada perlu dioptimalkan dalam implementasinya, seperti pengembangan Pasar Tani, kerjasama kemitraan, mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan hortikultura di tingkat produsen dan konsumen, serta pemasaran secara langsung. Di samping itu, pemantauan harga perlu didukung informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, up to date, dan kontinyu. Hal ini tidak saja didukung sistem informasi pemasaran yang berkualitas, namun juga Petugas Pelayanan Informasi Pasar (Petugas PIP) yang dapat berkinerja dengan baik. Selain itu, perlu didukung kegiatan dalam rangka meningkatkan ekspor produk hortikultura seperti promosi dan pameran.

Dalam rangka mendukung pengembangan akses pemasaran langsung dari petani/keompok tani produsen produk hortikultura, maka melalui

penyelenggaraan Pasar Tani diantaranya dengan menyediakan produk hortikultura berkualitas dengan harga terjangkau langsung dari petani/pelaku usaha sayur, buah segar dan produk hortikultura olahan. Pelaksanaan promosi Gelar Pasar Tani diharapkan masyarakat dapat membeli produk hortikultura berkualitas dan harganya terjangkau. Gelar Pasar Tani di beberapa wilayah/daerah sangat membantu petani/pelaku usaha produk Hortikultura dalam memasarkan produknya secara langsung sampai ke konsumen. Tahun 2024 ini, Dirjen hortikultura memberikan fasilitasi sarana prasarana pemasaran, untuk membantu pasar tani, kelompok pengolahan, kelompok pemasaran dan kelompok kelembagaan untuk dapat menyiapkan produk agar dapat dipasarkan secara maksimal. Ketersediaan sayur, buah, serta komoditas hortikultura lainnya sangat banyak sehingga siap untuk memasok di dalam daerah maupun keluar daerah.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga antara lain :

- Distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, kendala transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas pangan.
- Transportasi sering menyebabkan produksi hortikultura dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata dan kontinu oleh konsumen di daerah non sentra sehingga disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah.
- Penerapan teknologi produksi dan faktor kebijakan pemerintah menyebabkan meningkatnya harga input/sarana produksi.
- Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Untuk itu diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen

Menyikapi permasalahan-permasalahan diatas, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat PPHH melakukan:

Pelayanan informasi pasar bertujuan memberikan informasi dalam membuat kebijakan pemasaran komoditas hortikultura dan memperlancar arus perdagangan antar pulau/provinsi. Ketersediaan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik di Pusat maupun Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota). Diharapkan dengan terlaksananya PIP secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Upaya pemerintah untuk

meningkatkan posisi tawar petani dilakukan dengan memfasilitasi Pasar Tani di daerah selain juga kelompok pengolahan/pascapanen yang berada di daerah sentra produksi pertanian. Aktivitas kelembagaan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk kepada petani/ poktan/ gapoktan/ asosiasi petani maupun pelaku agribisnis lainnya. Untuk itu perlu fasilitasi sarana dan prasaran pemasaran terhadap kelompok-kelompok tersebut yang sudah ada di beberapa daerah sentra yang selama ini berjalan tidak optimal agar keberadaannya dapat lebih bermanfaat

3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) melalui *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP/SOP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas. Selain sebagai bukti penerapan GAP/SOP, nomor registrasi kebun dan lahan usaha saat ini digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor. Kebun dan lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi tersebut siap untuk ditindaklanjuti dengan sertifikasi seperti Sertifikasi GAP, Sertifikasi Organik, maupun standar jaminan mutu lainnya. Untuk pencapaian pengembangan penerapan jaminan mutu dan sistem standardisasi mutu komoditas hortikultura, maka perlu adanya Fasilitasi kegiatan standardisasi produk, pembinaan kelompok masyarakat dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan komoditi hortikultura. Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2.1.7. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Direktorat PPHH secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kode SS	IKSS/IKSP		Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS4	1	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura						
	a	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura sesuai peruntukan	%	80	80	80	80	80
	b	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	%	5	5	5	5	5
SS5	1	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura						
	a	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	US\$	325.114.100	343.516.785	361.919.470	380.322.155	398.724.840
	b	Peningkatan Fasilitas akses pasar hortikultura	%	8	8	8	8	8
	c	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	%	5	5	5	5	5

Sumber: Renstra Direktorat PPHH Tahun 2020-2024

2.1.8. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura merupakan penjabaran dari IKU Direktorat Jenderal Hortikultura. IKU Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET (MINIMAL)
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukan	100%
	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96%
Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	509.023.015 US\$
	Peningkatan Fasilitas akses pasar hortikultura	14,32%
	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89%
Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi	70%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET (MINIMAL)
Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	tanggung jawab Direktorat PPHH	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

2.1.9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dan sejalan dengan IKU serta sesuai dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang telah disepakati di Kementerian Pertanian. Dalam rencana kinerja tahunan telah ditetapkan target yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan pencapaiannya. Adapun target Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan revisi 1 (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura T.A. 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura	1	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Produk
	2	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	40	Kegiatan
	3	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	4	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	5	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	6	Sarana Pemasaran Hortikultura	30	unit
	7	Sertifikat Produk Hortikultura	100	Produk
	8	Kelompok Tani Terlatih GAP	110	Kelompok Masyarakat
	9	Kelompok Tani Terlatih GHP	40	Kelompok Masyarakat
	10	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	unit
	11	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	unit
	12	Horticulture Development of Dryland Areas Project	1	Unit
	13	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	unit
	14	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit

2.1.10. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Program Direktorat Jenderal Hortikultura. Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing diukur melalui Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 telah ditandatangani pada Desember 2023. Selama tahun anggaran 2024 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura telah melakukan revisi PK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Februari, Juli, dan Agustus 2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 awal hingga revisi terakhir dapat dilihat pada Lampiran. Revisi Perjanjian Kinerja pertama pada bulan Februari 2024 dilakukan dalam rangka penyesuaian target indikator kinerja, dimana Target 2024 harus lebih tinggi dari realisasi kinerja Tahun 2023. Revisi Perjanjian Kinerja kedua pada bulan Juli 2024 dilakukan dalam rangka pergantian Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Revisi Perjanjian Kinerja ketiga pada bulan Agustus 2024 dilakukan dalam rangka penambahan Indikator Kinerja Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Desember 2023)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	1.1	Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukkan	80.00%
		1.2	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	5.00%
2.	Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	365.918.784 US\$
		2.2	Peningkatan Fasilitas akses pasar hortikultura	8.00%
		2.3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	5.00%

Sumber: Perjanjian Kinerja Dit. PPHH

Anggaran kegiatan Direktorat PPHH pada Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 (Desember 2023) adalah senilai Rp 125.811.622.000.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-1 Februari 2024)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	1.1	Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukkan	100%
		1.2	Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96%
2.	Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	509.023.015 US\$
		2.2	Peningkatan Fasilitasi akses pasar hortikultura	14,32%
		2.3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89%
3.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

Sumber: Perjanjian Kinerja Dit. PPHH

Anggaran kegiatan Direktorat PPHH pada Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 (Februari 2024) adalah senilai Rp 125.811.622.000

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-2 Juli 2024)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	1.1	Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukkan	100%
		1.2	Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96%
2.	Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	509.023.015 US\$
		2.2	Peningkatan Fasilitasi akses pasar hortikultura	14,32%
		2.3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89%

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
3.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntable	3.1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

Sumber: Perjanjian Kinerja Dit. PPHH

Anggaran kegiatan Direktorat PPHH pada Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 (Juli 2024) adalah senilai Rp 125.811.622.000

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Dit. PPHH Tahun 2024 (Revisi ke-3 Agustus 2024)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	1.1	Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukkan	100%
		1.2	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96%
2.	Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	509.023.015 US\$
		2.2	Peningkatan Fasilitas akses pasar hortikultura	14,32%
		2.3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89%
3.	Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH	70%
4.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntable	4.1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

Sumber: Perjanjian Kinerja Dit. PPHH

Anggaran kegiatan Direktorat PPHH pada Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 (Agustus 2024) adalah senilai Rp 125.811.622.000

Struktur output kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura pada tahun 2024 sesuai dengan RKAKL-2024 terdiri dari (1) Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura (5887.ADA.010); (2) Sertifikasi Produk Hortikultura (5887.PDC.010); (3) Penerapan GAP (5887.QDD.021); (4) Penerapan GHP (5887.QDD.022); (5) Promosi Produk Hortikultura (5887.AEH.020); (6) Sarana Pemasaran Hortikultura (5887.CAG.010); (7) Informasi Pasar Komoditas Hortikultura (5887.BMA.030); (8) Sarana Pascapanen Hortikultura (5887.RAG.010); (9) Sarana Pengolahan Hortikultura (5887.RAG.011); (10) Prasarana Pascapanen Hortikultura (5887.RBK.010); (11) Prasarana Pengolahan Hortikultura (5887.RBK.011); (12) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev, dan Pelaporan (5887.AEA.020); (13) Peraturan/Norma/Pedoman (5887.AFA.021); (14) *Horticulture Development of Dryland Areas Project* (5887.RAI.010). Struktur output PPHH ditampilkan pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Struktur Anggaran Direktorat PPHH berdasarkan Output T.A. 2024

No	Output	Anggaran (Rp)	Target	
1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	2.500.000.000	1000	Produk
2.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	12.000.000.000	40	Kegiatan
3.	Promosi Produk Hortikultura	5.000.000.000	5	Promosi
4.	Peraturan/norma/pedoman	1.000.000.000	10	NSPK
5.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	2.859.000.000	205	Layanan
6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	3.000.000.000	30	unit
7.	Sertifikat Produk Hortikultura	3.500.000.000	100	Produk
8.	Kelompok Tani Terlatih GAP	3.300.000.000	110	Kelompok Masyarakat
9.	Kelompok Tani Terlatih GHP	1.200.000.000	40	Kelompok Masyarakat
10.	Sarana Pascapanen Hortikultura	31.352.622.000	635	unit
11.	Sarana Pengolahan Hortikultura	7.400.000.000	185	unit
12.	<i>Horticulture Development of Dryland Areas Project</i>	5.000.000.000	1	Unit
13.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	44.400.000.000	185	unit
14.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	3.300.000.000	20	unit

Tabel 9. Struktur Anggaran Direktorat PPH berdasarkan Kewenangan Pusat dan Daerah T.A. 2024

Anggaran Pusat (Rp)	Anggaran Daerah (Rp)	Total (Rp)
77.602.622.000	48.209.000.000	125.811.622.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80% - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60%<79%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi target tersebut. Capaian Kinerja Direktorat PPHH Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditampilkan pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat PPHH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	1.1	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	100%	88,78%	88,78%	Berhasil
		1.2	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96%	5,08%	102,42%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	2.1	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	509.023.015 US\$	544.994.031 US\$*)	107,07%	Sangat Berhasil
		2.2	Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura	14,32%	75,00%	523,74%	Sangat Berhasil
		2.3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional (%)	30,89%	31,26%	101,20%	Sangat Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	
3	Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3.1	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH	70%	75,00%	107,14%	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	4.1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert	3,27 Skala Likert	101,87%	Sangat Berhasil

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (Data diolah)

*)Data Sementara Pusdatin Kementan Diolah sampai dengan Desember 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ditampilkan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Perbandingan Target Kinerja Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	80%	80%	80%	80,50%	100%
		Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	5%	5%	5%	5,50%	4,96%
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	325.114.100 US\$	334.867.523 US\$	344.913.549 US\$	355.260.955 US\$	509.023.015 US\$
		Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura	8%	8%	8%	8,00%	14,32%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional (%)	5%	5%	5%	5%	30,89%
3	Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH	-	-	-	-	70%
4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	-	3,15 Skala Likert	3,19 Skala Likert	3,21 Skala Likert

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanenan dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	100,00%	102,50%	100,66%	100,00%	88,78%
		Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura	13,44%	7,00%	12,82%	4,95%	5,08%
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	424.126.492,16 US\$	466.356.422,57 US\$	460.988.278,09 US\$	484.125.086,92 US\$	544.994.031 US\$*)
		Peningkatan Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura	20,00%	14,00%	0,00%	14,28%	75,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional (%)	-	-	-23,22%	30,81%	31,26%
3	Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH	-	-	-	-	75,00%
4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	-	-	3,17Skala Likert	3,24Skala Likert	3,27Skala Likert

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024, dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran program yang mengahasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 6 (enam) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura; 2) Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura; 3) Peningkatan Fasilitas akses pasar hortikultura; 4) Pertumbuhan Jaminan Mutu; 5) Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH; dan 6) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori berhasil adalah Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan.

1. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Hortikultura

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan telah mendukung sasaran kinerja yaitu meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura, dengan indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan yang sesuai sesuai peruntukan dan indikator peningkatan fasilitas nilai tambah

produk hortikultura. Kedua indikator ini dilakukan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna meningkatkan nilai tambah produk serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga mengatasi over supply dan akumulasi volume produk segar off grade atau produk yang kualitas/gradenya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan berupa sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura. Melalui fasilitasi bantuan ini diharapkan dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru dan upaya untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura yang ada (*existing*) agar menjadi lebih maju/naik kelas sehingga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Realisasi pencapaian kinerja Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang sesuai peruntukkan dan peningkatan nilai tambah sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang sesuai peruntukkan akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang sesuai peruntukkan

Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang sesuai peruntukkan dihitung berdasarkan jumlah fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang sesuai peruntukkan dibagi dengan jumlah target sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dengan rumus formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sapras PP dan PH yang terealisasi sesuai peruntukkan}}{\text{Jumlah target bantuan sapras PP dan PH}} \times 100\%$$

Definisi sarana hortikultura berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura. Adapun definisi prasarana hortikultura berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura. Definisi pengolahan hortikultura berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha

Hortikultura adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi produk turunan. Oleh karena itu sarana prasarana pengolahan hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan serta penunjang utama yang dibutuhkan untuk mengubah secara fisik, kimiawi dan biologis bahan komoditas hortikultura sebagai produk turunan. Adapun contoh produk turunan hasil pengolahan hortikultura adalah bawang merah goreng, pasta cabai, saus cabai, puree buah, keripik buah, minuman buah, dodol buah dan lain-lain.

Definisi sarana prasarana pascapanen adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan serta penunjang utama yang dibutuhkan untuk melakukan proses pascapanen. Berdasarkan definisi di atas, bangsal pascapanen merupakan salah satu sarana prasarana pascapanen yang dapat menunjang kegiatan hortikultura. Output kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang terkait dengan kegiatan di atas adalah output sarana dan prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura yang terdapat pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Realisasi Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang sesuai peruntukkan (Satker Pusat dan Daerah)

No	Uraian	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Persentase (%)
1.	Sarana Peningkatan Nilai Tambah			
	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	522	82,20
	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	184	99,46
	Sub Total	820	706	86,10
2	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	184	99,46
	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	20	100,00
	Sub Total	205	204	99,51
	TOTAL	1.025	910	88,78

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (Data diolah)

Tahun 2024, total target alokasi bantuan sarana pascapanen kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura sebanyak 635 unit dan realisasinya sebanyak 522 unit (82,20%). Sedangkan untuk bantuan prasarana pascapanen, targetnya sebanyak 185 unit dan realisasinya sebanyak 184 unit (99,46%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kegiatan untuk bantuan sarana dan prasarana pascapanen dikategorikan berhasil. Hal yang menyebabkan tidak terealisasinya 1 bangunan prasarana pascapanen karna informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bahwa CPCL yang diajukan oleh aspirasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Target penerima sarana pascapanen bantuan untuk satker pusat sebanyak 517 unit dan sarana pascapanen daerah (Tugas Pembantuan Provinsi) sebanyak

118 unit dengan total bantuan sebanyak 635 unit. Sedangkan target bantuan untuk prasarana pascapanen pusat sebanyak 67 unit dan satker daerah sebanyak 118 unit dengan total bantuan sebanyak 185 unit. Realisasi pencapaian untuk sarana pascapanen sebesar 82,20% dan dan prasarana pascapanen sebesar 86,10%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kegiatan untuk bantuan sarana dan prasarana pascapanen berhasil.

Hal yang menyebabkan tidak terealisasinya sarana pascapanen karena adanya pengurangan anggaran (*Automatic adjustment*) yang disebabkan adanya kebijakan penyesuaian anggaran secara otomatis yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan cadangan anggaran untuk relokasi kegiatan yang lain.

Tabel berikut menunjukkan sarana dan prasarana pascapanen untuk satker pusat dan satker daerah terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14. Sarana & Prasarana Pascapanen Satker Pusat & Daerah TA 2024

Sarana pascapanen hortikultura	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pusat	517	405	78,34
Daerah	118	117	99,15
Sub Total	635	522	82,20
Prasarana Pascapanen Hortikultura	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pusat	67	67	100
Daerah	118	117	99,15
Sub Total	185	184	99,46
Total	820	706	86,10

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (*Data diolah*)

Target sarana pengolahan terdiri dari (Satker Pusat) sebanyak 67 unit dan daerah sebanyak 118 unit dengan total sebesar 185 unit dan realisasi sebesar 184 unit (99,45%). Sedangkan untuk bantuan prasarana pengolahan (satker pusat), targetnya sebanyak 20 unit dan realisasinya sebanyak 20 unit (100%). Tabel sarana dan prasarana pengolahan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 15. Target, Realisasi Sarana Prasarana Pengolahan T.A. 2024

Sarana pengolahan	Target (unit)	Realisasi (unit)	Persentase (%)
Pusat	67	67	100,00
Daerah	118	117	99,15
Sub Total	185	184	99,45
Prasarana Pengolahan	Target (unit)	Realisasi (unit)	Persentase (%)
Pusat	20	20	100,00
Daerah*	0	0	0
Total	20	20	100

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (*Data diolah*)

Rasio sarana prasarana pascapanen dan pengolahan pada tahun 2024 adalah $910/1.025 \times 100\% = 88,78\%$. Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 793 unit maka persentase rasio sarana prasarana pascapanen dan pengolahan yang tersedia sesuai peruntukannya adalah sebesar 100% (Tabel 16).

Tabel 16. Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura yang sesuai Peruntukkan

Target	Realisasi	Persentase
100 %	88, 78 %	88,78 %

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (Data diolah)

Kriteria penerima bantuan untuk sarana prasarana pascapanen dan pengolahan adalah bantuan lengkap dimana kelompok menerima bantuan sarana dan prasarana pascapanen (bangsal pascapanen) secara lengkap dengan sarana pengolahan sesuai dengan produk yang akan diolah oleh penerima bantuan. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan diversifikasi produk hortikultura menjadi produk olahan.

Berdasarkan hasil kunjungan lapang, koordinasi secara intensif serta virtual zoom dengan kelompok tani penerima bantuan, diperoleh informasi bahwa bantuan sarana dan prasarana pascapanen hortikultura berupa kendaraan roda tiga, keranjang panen, bak pencuci multi guna, meja peniris dan meja pengemas sangat bermanfaat bagi kelompok tani penerima bantuan. Adapun manfaat dari masing-masing sarana pascapanen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Motor roda tiga: sebagai sarana pengangkutan produk dari lahan ke bangsal pascapanen dan dari bangsal pascapanen ke outlet/ pemasaran.
- b. Keranjang Panen: sebagai wadah untuk panen.
- c. Alat/mesin pencuci multi guna : sebagai sarana pencucian produk hortikultura (khusus produk horti yang memerlukan pencucian).
- d. Meja peniris: Sebagai sarana meniriskan produk setelah proses pencucian.
- e. Meja pengemas: Sebagai sarana/ tempat/ alas untuk mengemas produk.

Selain mengangkut produk dari lahan ke bangsal pascapanen, motor roda tiga juga digunakan untuk mengangkut benih, pupuk, dan lain-lain dari tempat pengumpulan saprodi ke lahan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sarana dan prasarana pascapanen sangat bermanfaat bagi kelompok dalam melakukan penanganan pascapanen hortikultura di bangsal pascapanen,

mengurangi tingkat kehilangan hasil dan memperpanjang masa simpan produk hortikultura. Selain itu, kelompok tani penerima bantuan dapat mengolah produk hortikultura pada saat terjadi over supply sehingga terjadi diversifikasi produk dari produk segar menjadi produk olahan yang dapat dipasarkan ke pasar lokal (kios) atau pasar modern yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dan menunjang perekonomian masyarakat. Dokumentasi bangsal pascapanen dapat dilihat pada Lampiran.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bantuan sarana dan prasarana pascapanen TA 2024. Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi saat kunjungan lapang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi kelompok penerima bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan TA 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pada awal kegiatan, adanya pemblokiran anggaran dari Ditjen DJA untuk prasarana pascapanen (satker pusat) dan Satker Daerah daerah yaitu - Provinsi Sulawesi Barat 1 unit - Provinsi NTT 3 unit - Provinsi NTB 4 unit - Provinsi Sulawesi Selatan 1 unit - Provinsi Banten 4 unit - Provinsi Papua 1 unit - Provinsi Maluku Utara 2 unit. Hal ini mengakibatkan kegiatan baru dilaksanakan pada bulan September 2024.d
- b. Pemahaman beberapa tenaga ahli dari aspirasi terhadap pelaksanaan prasarana pascapanen (bangsal) yang belum banyak yang menyebabkan data CPCL belum masuk ke pusat. Data CPCL yang diminta ke tenaga ahli Anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung aspirasi dapil membutuhkan waktu yang lama dan koordinasi yang berulang-ulang sehingga menghambat masuknya data.
- c. Adanya perubahan lokasi nama penerima bantuan maupun lokasi desa yang memperlambat dalam pembuatan surat Keputusan penerima bantuan yang diterbitkan dari pusat.
- d. Perlunya kelengkapan data atau rekomendasi teknis dari Ditjen PU PR kepada Dit. PPHH berdasarkan permintaan dari Ditjen Anggaran pada saat Triwulan 3 yang menyebabkan terjadinya pemblokiran anggaran sehingga memperlama waktu pelaksanaan kegiatan padahal selama ini surat rekomendasi teknis tersebut tidak menjadi persyaratan karna bangunan yang dibangun adalah bangunan yang sederhana dan tidak menjadi Bangunan Milik Negara. Pembukaan blokir oleh Ditjen Anggaran pada akhir Agustus 2024.
- e. Keterbatasan pemahaman dari beberapa petugas Dinas Pertanian Kabupaten mengenai alokasi bantuan berupa swakelola dan transfer uang sehingga sangat memerlukan pembahasan dan koordinasi dengan cara

- berulang-ulang dengan petugas Dinas Pertanian Provinsi/kabupaten.
- f. Beberapa alat sarana pascapanen dan sarana pengolahan yang tersedia di lokasi kabupaten belum memenuhi persyaratan TKDN dan test report sehingga harus menggunakan surat penggunaan produk dalam negeri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kabupaten terkait.
 - g. Kompetensi dari petugas supervisi, petugas Dinas Pertanian Kab dan penerima bantuan (poktan) dalam memahami dokumen pengspjan dalam pencairan prasarana pascapanen (tipe swakelola) yang terkadang terkendala karna kurang ketelitian dalam penghitungan dana yang dikeluarkan, sehingga memperlambat proses pencairan tahap berikutnya.
 - h. Beberapa alat sarana pascapanen dan sarana pengolahan yang tersedia di lokasi kabupaten belum memenuhi persyaratan TKDN dan test report sehingga harus menggunakan surat penggunaan produk dalam negeri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kabupaten terkait.
 - i. Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi di Kab. Seram Bagian Timur yaitu :
 - Adanya keterlambatan pendistribusian bahan bangunan bangsal ke lokasi kegiatan pembangunan.
 - Jarak untuk mendapatkan bahan bangunan yang sangat sulit dan jauh yang berada di ibukota Provinsi Maluku.
 - Tidak tersedianya bahan bangunan di lokasi kegiatan dan harus dibeli di ibukota Provinsi.
 - Lokasi di Kab. Buru yang mengalami hujan dan ombak yang tinggi menyebabkan kesulitan petugas supervise untuk memantau lokasi dan mengakibatkan pengiriman pengspjan dokumen menjadi terlambat ke pusat.
 - j. Terdapat permasalahan teknis yang dihadapi di Kab. Simalungun :
 - Lambatnya pendistribusian bahan bangunan bangsal ke lokasi kegiatan pembangunan bangsal dikarena kondisi cuaca/iklim di Kab. Simalungun sering turun hujan yang mengakibatkan jalan terkendala akibat adanya longsor.
 - Tidak tersedianya bahan bangunan di lokasi kegiatan dan harus diberi ke Ibukota Provinsi Sumatera Utara.
 - k. Banyaknya kesibukan kegiatan di daerah yang menyebabkan dokumen beberapa terlambat dikirim ke pusat dan kurangnya ketelitian dari petugas supervisi dalam mengetik dokumen sehingga ada kesalahan pengetikan.
 - l. Terbatasnya kompetensi dari petani/kelompok tani mengenai teknologi pengolahan pada beberapa komoditas hortikultura.

m. Keterbatasan jaringan pemasaran yang belum berkembang luas oleh kelompok tani khususnya yang baru membangun UMKM produk olahan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, saran tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Perlu koordinasi, kerjasama dan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Dinas Pertanian terkait, petugas supervisi dan kelompok tani untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan
- b. Dinas Pertanian penerima bantuan harus mengecek kelayakan bagi penerima bantuan seperti ketersediaan sarana pendukung (listrik, air, dll) serta fasilitas pendukung lainnya.
- c. Perlu sosialisasi, bimbingan, pelatihan mengenai teknologi pengolahan produk hortikultura dengan bekerjasama dengan pihak terkait (perguruan tinggi, lembaga penelitian dan masyarakat atau kementerian terkait).
- d. Perlu upaya dari kelompok tani dibantu oleh Dinas Pertanian setempat untuk mensosialisasikan produk olahan dalam event seperti pameran di dalam kabupaten atau antar provinsi dengan tetap menjalin koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan kelompok tani yang tergabung dalam Asosiasi UMKM hortikultura.
- e. Perlu koordinasi antara petugas supervisi di lokasi bangsal dengan Penanggung Jawab (PJ) pusat agar pelaksanaan pembangunan bangsal pascapanen dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar.
- f. Perlu peran aktif dari kelompok untuk melakukan pengurusan ijin PIRT dengan bimbingan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Provinsi setempat.
- g. Dinas Pertanian yang mengusulkan kelompok tani untuk menerima bantuan harus dapat memastikan kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan seperti kapasitas produksi, dukungan dinas, status lahan dan clear dan adanya sifat kewirausahaan dari kelompok.
- h. Perlu pembinaan, monitoring dan bimbingan dari Pusat dan Dinas Pertanian setempat dalam pengembangan komoditas hortikultura di lokasi sentra.
- i. Perlu kerjasama antar poktan yang bergerak dalam pengembangan komoditas hortikultura agar dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih besar.
- j. Poktan mempergunakan prasarana pengolahan dengan maksimal untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan kelompok.
- k. Perlu penerapan penanganan pascapanen yang baik (GHP) untuk mempertahankan mutu komoditas hortikultura agar nilai tambah produk meningkat.

- l. Perlu peningkatan teknologi dalam pengolahan produk yang akan dihasilkan kepada kelompok tani agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing di pasar dalam maupun luar negeri.
- m. Pemilihan CPCL yang tepat perlu dilakukan dengan menjalin koordinasi intensif terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran.
- n. Tenaga ahli dari Komisi IV DPR RI yang belum menyerahkan data CPCL, agar segera berkoordinasi dengan Diperta Prov/Kab dan mengirimkan datanya ke Pusat sesuai dengan kriteria penetapan CPCL yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dit. PPHH 2024.
- o. Perlu koordinasi dan sinergitas dengan kementerian PUPR dan Ditjen Anggaran dalam rangka percepatan anggaran prasarana pascapanen pusat dan beberapa daerah yang diblokir.

B. Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura

Peningkatan fasilitas nilai tambah produk hortikultura adalah sarana pascapanen, sarana pengolahan, sarana pascapanen (roda 3 non aspirasi), sarana pascapanen lainnya dimana sarana-sarana tersebut **mendukung secara langsung** terhadap indikator kinerja peningkatan fasilitas nilai tambah produk hortikultura.

Peningkatan fasilitas nilai tambah produk hortikultura dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\frac{(\text{Fasilitas sarana peningkatan nilai tambah}(t) - \text{Fasilitas sarana peningkatan nilai tambah}(t-1))}{\text{Fasilitas sarana peningkatan nilai tambah}(t-1)} \right) \times 100\%$$

Realisasi untuk sarana pascapanen dan sarana pengolahan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024 ditampilkan pada data sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Persentase (%)
1	Sarana Pascapanen	424	292	387	395*	102,06
2	Sarana Pengolahan	34	233	164	184	112,19
	Total	458	525	551	579	5,08

Sumber: Dit. PPHH, 2024 (Data diolah)

* sarana pascapanen yang terkait langsung nilai tambah terdiri dari sarana pascapanen 184 unit, sarana pascapanen motor roda 3 (aspirasi) 163 unit, sarana pascapanen motor roda 3 sebanyak 6 unit dan sarana pascapanen lainnya sebanyak 42 dari 39 CPCL (3 kelompok dapat 2 paket).

Realisasi fasilitas bantuan sarana pascapanen yang mendukung secara langsung nilai tambah produk hortikultura sebanyak 395 unit dan sarana

pengolahan sebanyak 185 unit dengan total realisasi sebanyak 579 unit, sehingga peningkatan fasilitasi nilai tambah produk hortikultura dibandingkan tahun 2023 adalah sebagai berikut : $(579 - 551) / 551 \times 100\% = 5,08\%$. Tabel peningkatan fasilitasi nilai tambah hortikultura yang membandingkan target dan realisasi ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 18. Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura TA 2024

Target (%)	Realisasi (%)	Persentase
4,96 %	5,08 %	102,42 %

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai tambah produk hortikultura tahun 2024 dengan target 4,96 % dengan realisasi sebesar 5,08 % dengan persentase 102,42 %. Peningkatan nilai tambah disebabkan karna ada peningkatan jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang mendukung secara langsung nilai tambah tahun 2024 sebanyak 579 unit dibandingkan dengan tahun 2023 (551 unit) sebanyak 28 unit atau 5,08 %. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini, maka alokasi anggaran sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023 namun ternyata tidak terjadi penurunan nilai tambah hortikultura tahun 2024 karna adanya peningkatan jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang mendukung secara langsung nilai tambah produk hortikultura pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tabel berikut menunjukkan perbandingan anggaran sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2023 dan 2024 yang terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 19. Anggaran Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tahun 2023 dan 2024

Fasilitasi bantuan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sarana pascapanen	40.025.335.000	31.352.622.000
Sarana pengolahan	15.292.146.000	7.400.000.000

Sumber : Dit. PPHH, 2024 (data diolah)

Peningkatan nilai tambah hortikultura yang telah dilakukan melalui fasilitasi sarana bantuan sarana pascapanen dan pengolahan yang mendukung secara langsung nilai tambah produk hortikultura kepada kelompok penerima manfaat diharapkan dapat mendorong penumbuhan UMKM Hortikultura, meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing produk produk dalam di negeri di pasar internasional.

2. Meningkatnya Akses Pasar Komoditas Hortikultura

A. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura

Indikator nilai ekspor untuk produk hortikultura merupakan perhitungan jumlah nilai ekspor produk hortikultura dalam US\$ sesuai data BPS mulai bulan Januari sampai Desember 2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, komoditas yang diperhitungkan sebagai total nilai ekspor ada 12 (dua belas) komoditas yaitu Krisan, Kentang, Bawang Merah, Jamur dan Cendawan, Cabai, Pisang, Nenas, Mangga, Manggis, Durian, Salak dan Jahe.

Berdasarkan perhitungan data nilai ekspor komoditas hortikultura untuk dua belas komoditas di atas sampai dengan Desember 2024 adalah senilai US\$ 544.994.031; dan Tahun 2023 senilai US\$ 484.125.086,92. Nilai ekspor komoditas hortikultura tahun 2024 meningkat sebesar 114,64% disbanding tahun 2023. Nilai ini lebih tinggi dari dibanding target nilai ekspor hortikultura senilai US\$ 509.023.015 (PK.Dit.PPHH) atau mencapai 107.07%.

Tabel 20. Nilai Ekspor Hortikultura Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Komoditas	Nilai (US\$)	
		2023	2024 ^{*)}
1	Krisan	1.509.678,30	2.505.868
2	Kentang	2.668.394,92	2.661.914
3	Bawang	11.786.427,70	18.716.062
4	Aneka Jamur dan Cendawan	11.299.216,29	8.984.642
5	Cabai	22.010.570,12	22.936.113
6	Pisang	9.557.383,26	10.517.406
7	Nenas	277.949.676,65	316.085.048
8	Mangga	1.400.791,66	1.750.878
9	Manggis	112.255.323,18	146.177.538
10	Durian	1.113.284,08	1.817.191
11	Salak	4.169.623,84	4.332.528
12	Jahe	28.404.716,92	8.508.841
	Grand Total	484.125.086,92	544.994.031

Sumber Data : BPS Tahun 2023 dan 2024

^{*)}Data Sementara Pusdatin Kementan Diolah sampai dengan Desember 2024

Tabel 21. Target dan Realisasi Nilai Ekspor Hortikultura Tahun 2024

Target (US\$)	Realisasi (US\$)	Persentase (%)
509.023.015	544.994.031	107,07

Sumber: Dit. PPHH (diolah)

Pencapaian ini disebabkan karena Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mensyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pencapaian ini ditunjang oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2024 yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi produk hortikultura melalui bussines matching (Kedutaan - Manhattan hotel, Asia Fruits Logistica - Hongkong, bilateral Indonesia-Singapura), pameran (IKN, Manhattan Hotel, Ritz Carlton, OASE Makasar) dan pembagian produk hortikultura gratis di propinsi DKI (Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura, Komplek Palapa-Pasar Minggu), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah. Promosi dilakukan untuk masyarakat umum.

Permasalahan kegiatan peningkatan nilai ekspor: (1) Adanya penurunan produksi akibat el-nino yang menyebabkan kualitas produk menurun (buah kecil-kecil) sehingga produk tidak memenuhi kualitas ekspor. Selain itu kekeringan panjang akibat el-nino menyebabkan panen mundur yang juga menyebabkan produk tidak tersedia dan ekspor gagal, selain juga biaya logistic distribusi di Indonesia tergolong tinggi yang menyebabkan kenaikan harga produk. (2) Produk hortikultura Indonesia, khususnya buah masih belum dikembangkan dalam skala komersial, sehingga belum dapat memenuhi "economy of scale"/skala ekonomi, yang menjadi tantangan ketika produk hortikultura tersebut akan diekspor, dan (3) Tidak semua produk hasil panen bisa memenuhi standar ekspor permintaan buyer

Tindak Lanjut Permasalahan antara lain (1) Penguatan negoisasi diplomasi dan perdagangan dengan negara mitra, (2) Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam peningkatan ekspor produk hortikultura dan (3) Program pengembangan kampung hortikultura terpadu hulu hilir skala komersial.

B. Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura

Fasilitas akses pasar hortikultura dihitung berdasarkan jumlah MOU/nota kesepahaman kerjasama akses pasar, penandatanganan protokol ekspor baru, akses pasar baru komoditas hortikultura. Pada tahun 2024, dalam rangka meningkatkan akses pasar hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura dengan melibatkan pelaku usaha berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan *business matching*. Hasil kegiatan promosi dan *business matching* berupa *LoI (Letter Of Intent)* yaitu sebuah dokumen yang menyatakan komitmen awal/nota kesepahaman kerjasama suatu pihak (pelaku usaha/eksportir) untuk berbisnis dengan pihak lain (*buyer* di negara tujuan).

Beberapa kesepakatan kerjasama dari kegiatan *business matching* antara lain sebagai berikut :

1. PT. Kultiva Indonesia Makmur dan Exotique Shop Inc
2. PT.Mahkota Manggis Sehati dan Beijing Golden Famous International
3. Mitra Tani Unggul dan PT. Mega Inovasi Organik
4. PT. Bali Organik Subak untuk suplai frozen fruit ke Rusia, saat ini masih dalam proses komunikasi mengenai texture dan packaging
5. Sekar tani mengirimkan sample kunyit serbuk, kunyit krispi dan jahe ke PT. Raja Import untuk rencana ekspor ke Filipina
6. Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri mensuplai buah nanas untuk selai nanas dengan jumlah 20 ton per bulan, ukuran 1,6 ons/buah untuk PT.Indo Tani Sejahtera
7. Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri mendapat permintaan Pisang Kepok Gerecek sebanyak 40 ton/bulan ke PT. KSM Global Indonesia (perwakilan Korea)
8. PT. Asia Agro Digital dan produsen untuk pengembangan nenas Queen di Kediri dan buah naga organik di Jember untuk pasar di Uni Emirat
9. PT GFSN janji bertemu dengan China untuk survey awal kapulaga
10. AESBI dengan Mr.A Chu, diberikan kesempatan untuk eksplor beberapa kebutuhan mereka seperti Mangga (semua jenis terutama dari Majalengka), Buah Naga, Sawo dan Durian
11. Agrowing sudah ada pembicaraan dengan Kultiva.co untuk suplai melinjo untuk emping namun dalam masih proses negoisasi
12. PT. Sumatran Organic Spice dengan Jiahe Group Germany untuk menyediakan komoditas Jahe sebanyak 20 Ton dengan perkiraan nilai US\$ 40.000
13. KSIP Agro dengan Lutian Trading Hongkong untuk menyediakan buah dan sayur sebanyak 20 Ton dengan nilai US\$ 24.000
14. JavaFresh dengan Jade Premium Company Hongkong menyediakan Manggis dan Jeruk Purut

Pada Tahun 2023, realisasi fasilitasi akses pasar adalah sebanyak 8 LOI dan pada Tahun 2024 dihasilkan realisasi sebanyak 14 LOI. Berdasarkan data

tersebut diperoleh hasil peningkatan fasilitasi akses pasar hortikultura adalah senilai $(14 - 8)/8 \times 100\% = 75\%$. Oleh karena itu, persentase realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 menjadi 523,74% (Sangat Berhasil). Peningkatan fasilitasi akses pasar hortikultura dapat dijelaskan pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Peningkatan Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura Tahun 2024

Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
14,28%	75%	523,74%

Sumber: Dit. PPHH (diolah)

Untuk realisasi fasilitasi akses pasar pada tahun 2023 sebanyak 8 kesepakatan kerjasama antara lain sebagai berikut :

1. UMKM Hortikultura dengan Ranch Market
2. UMKM Hortikultura dengan Bloom Agro untuk pasar ekspor komoditas pertanian ke Singapura
3. UMKM Hortikultura dengan Indonesia Food and Agriculture Council (IFAC) yang telah memasarkan produk UMKM Indonesia ke pasar USA
4. PT. Sinar Harapan Bersatu dengan buyer Thailand
5. Java Fresh dengan buyer Kanada (Komoditas Manggis dan Jeruk Purut)
6. Agrowing dengan buyer di Rotterdam Belanda (Jahe)
7. Better Life Farming HDDAP
8. Bintang Pratama Sejahtera HDDAP

Keberhasilan pencapaian target ini didukung kerjasama yang baik antar instansi terkait antara lain kedutaan besar di Jakarta, Dinas Pertanian Propinsi/kabupaten/kota, pelaku usaha/UMKM Hortikultura dan eksportir untuk meningkatkan akses pasar melalui kerjasama dengan mitra, serta dukungan informasi pasar yang bersumber dari Petugas PIP (Pelayanan Informasi Pasar) Hortikultura di daerah.

Permasalahan kegiatan akses pasar hortikultura: (1) Proses dari suatu kesepakatan kerjasama perdagangan antara pelaku usaha hortikultura dengan buyer hingga berhasilnya pengiriman ekspor memerlukan waktu panjang, tidak saat itu juga langsung berhasil ekspor namun merupakan target jangka panjang, (2) Proses penyusunan dan negoisasi protokol ekspor membutuhkan waktu yang cukup lama dan (3) Pemenuhan Standar mutu ekspor yang diminta oleh mitra/buyer agak rumit.

Tindak Lanjut permasalahan antara lain: (1) Perlu dilakukan pembinaan intensif untuk bisa memenuhi standar ekspor permintaan buyer luar negeri, (2) Secara rutin melaksanakan pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan Badan

Karantina dan stakeholder terkait dalam rangka mempercepat proses penyusunan dan negosiasi protokol ekspor produk hortikultura ke berbagai negara tujuan ekspor.

C. Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional (PPKM)

Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional dilakukan dengan perhitungan persentase peningkatan fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura nasional, yaitu penerapan GAP, penerapan GHP, registrasi lahan usaha hortikultura, dan sertifikasi produk hortikultura. Capaian kinerja jaminan mutu produk hortikultura tahun 2023, dan 2024 dapat dilihat melalui Tabel berikut.

Tabel 23. Capaian Kinerja Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2023 dan 2024

No	Kegiatan	Realisasi Unit (2023)	Realisasi Unit (2024)
1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha	1.004	1.327
2.	Sertifikat Produk Hortikultura (Organik)	33	22
3.	Penerapan GAP	55	110
4.	Penerapan GHP	50	40
Total		1.142	1.499

Sumber: Dit. PPHH

Realisasi kegiatan fasilitasi jaminan mutu produk hortikultura nasional mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dari total sebelumnya 1.142 unit menjadi 1.499 unit. Realisasi Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2024 sejumlah 1.499 Produk, diperoleh dari kegiatan Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura sebanyak 1.327 produk; Penerapan GAP sebanyak 110 kelompok; Penerapan GHP sebanyak 40 kelompok; dan Sertifikasi Organik sebanyak 22 produk.

Adapun pertumbuhan jaminan mutu produk hortikultura dapat dihitung menggunakan formula berikut :

$$\left(\frac{(\text{Fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura}(t) - \text{Fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura}(t-1))}{\text{Fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura}(t-1)} \right) \times 100\%$$

Dengan menggunakan formula tersebut, dapat dihitung pertumbuhan jaminan mutu produk hortikultura sebagai berikut :

(t) realisasi Fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura tahun berjalan : 1499 produk

(t-1) realisasi Fasilitasi sistem jaminan mutu produk hortikultura tahun sebelumnya : 1142 produk

$$\text{Pertumbuhan Jaminan Mutu} = \frac{(t - (t - 1))}{(t - 1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Jaminan Mutu} = \frac{(1499 - 1142)}{(1142)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Jaminan Mutu} = 31,26\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2024 sebesar 31,26%. Dengan demikian, tingkat keberhasilan capaian kinerja Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional pada Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 30,89% sehingga masuk kategori sangat berhasil (101,2%) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2024

Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)
30,89	31,26%	101,20%

Sumber: Dit. PPHH (diolah)

Sebagai gambaran perbandingan tingkat keberhasilan capaian kinerja Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realiasi	Persentase Capaian
2020	5%	-	-
2021	5%	-	-
2022	5%	-23,22%	-464,40%
2023	5%	30,81%	616,20%
2024	30,89%	31,26%	101,20%

Sumber: Dit. PPHH (diolah)

Pada tahun 2020 Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional tidak dapat diukur karena tidak ada kegiatan untuk fasilitasi jaminan mutu, anggaran kegiatan tersebut mengalami *refocussing* total di tahun 2020. Pada tahun 2021, kegiatan Jaminan Mutu Produk Hortikultura terealisasi sebanyak 1.437 kegiatan dari target 1.138 kegiatan (126,2%). Pada Tahun 2022, Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional benilai negatif disebabkan adanya penurunan realisasi capaian jaminan mutu produk pada Tahun 2022 karena adanya *refocussing* anggaran. Sedangkan pada Tahun 2023 dan 2024 Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional terus mengalami peningkatan.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dan didorong keinginan pelaku usaha untuk bisa melakukan ekspor, dimana salah satu persyaratan ekspor adalah registrasi lahan usaha hortikultura. Permasalahan kegiatan jaminan

mutu produk hortikultura antara lain: (1) Pemblokiran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan sering terlambat (2) Adanya *refocussing* anggaran yang berakibat revisi anggaran (3) Adanya perubahan CPCL dari daerah (4) Terbatasnya SDM yang menangani mutu/sering berganti (6) Belum adanya *Traning of Trainer* (TOT) registrasi lahan untuk petugas mutu di Provinsi (7) Cara pemakaian aplikasi registrasi lahan belum dikuasai oleh semua petugas mutu di daerah (8) Kesulitan mencari CPCL Organik (petani/kelompok tani) yang memenuhi persyaratan. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan antara lain : (1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Provinsi (2) Melakukan pengawalan terhadap kegiatan jaminan mutu produk hortikultura.

3. Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

A. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH Tahun 2024 masih mengacu pada nilai tahun 2023 (sesuai surat terlampir), yaitu 1,5. Bobot penilaian untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Investasi sebesar 2 sehingga capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH sebesar $1,5/2 = 75\%$. Dengan target 70% maka persentase capaian sebesar 107,14% masuk kategori sangat berhasil.

Tabel 26. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
70	75%	107,14%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH adalah Rencana Aksi Tematik Investasi. Kegiatan pada tahun 2024 untuk mendukung rencana aksi tersebut adalah *Business Matching* Pelaku Usaha Hortikultura. Pelaksanaan kegiatan *Business Matching* Pelaku Usaha Hortikultura dengan capaian sebesar 100% senilai Rp 330.795.000,00. Perdagangan luar negeri subsektor hortikultura sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di negara tujuan sehingga perlu melakukan peningkatan *market intelegence*. Kegiatan ini telah menghasilkan kontrak Kerjasama perdagangan/ ekspor komoditi buah-buahan, capaian ini telah direalisasikan pada TW II TA 2024.

4. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel

A. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan pegawai Direktorat PPHH terhadap layanan tata usaha Direktorat PPHH. Metode pengukuran indikator ini mengacu pada metode pengukuran tingkat kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index*) dengan cara survei menggunakan kuesioner yang mencakup 5 (lima) dimensi terdiri dari: a). Berwujud (*tangibles*), b). Keandalan (*reliability*), c). Daya Tanggap (*responsive*), d). Kepastian (*assurance*), e). Empati (*emphaty*). Survei yang dilakukan dengan metode *online* menggunakan *webform*.

Survei membandingkan tingkat kepentingan atau harapan dengan tingkat kepuasan atas layanan tata usaha Direktorat PPHH secara umum, dengan menggunakan skala likert 1-4 yaitu:

- 1 = angat tidak penting/sangat tidak puas,
- 2 = tidak penting/tidak puas,
- 3 = penting/puas,
- 4 = sangat penting/sangat puas.

Penggunaan skala likert 1-4 mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman SKM UKPP Kementan. Pengkategorian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden dengan cara sebagai berikut :

- Skor minimum per item : 1;
- Skor maksimum per item : 4;
- Rentang (R) : $4 - 1 = 3$;
- Banyak kategori (K) : 4;
- Panjang interval : $R/K = 3/4 = 0,75$

maka diperoleh interval seperti tercantum pada Tabel 27.

Tabel 27. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-Rata

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
1,00 - 1,75	Sangat Tidak Puas
1,76 - 2,50	Tidak Puas
2,51 - 3,25	Puas
3,25 – 4,00	Sangat Puas

Survei kepuasan layanan tata usaha Direktorat PPHH dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai lingkup Direktorat PPHH

Tabel 28. Survei kepuasan layanan tata usaha Direktorat PPHH

TOTAL RESPONDEN	UNIT KERJA			
	51			
	Jumlah	%	Target	% Progress
Direktorat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura	51	100,00	31	164,52

Hasil penilaian atas layanan Tata Usaha Direktorat PPHH ditampilkan pada Tabel 29.

Tabel 29. Hasil Penilaian atas Layanan Tata Usaha Direktorat PPHH

Tipe	Nilai Rata2 Kepuasan
Tangibles (Berwujud)	3,15
Reliability (Keandalan)	3,32
Responsive (Daya tanggap)	3,30
Assurance (Kepastian)	3,26
Emphaty (Empati)	3,30
Rata-Rata	3,27

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa Tingkat kepuasan terhadap tipe tangibles (berwujud) layanan tata usaha dari 51 responden adalah sebesar 3,15, untuk tingkat kepuasan terhadap tipe *reliability* (keandalan) sebesar 3,32, untuk tingkat responsive (daya tanggap) sebesar 3,30, untuk tipe *assurance* (kepastian) 3,26, dan tipe *emphaty* (empati) sebesar 3,30, sehingga diperoleh Tingkat kepuasan rata-rata pegawai Dit PPHH atas layanan Tata Usaha adalah sebesar 3,27. Hasil survei ini menunjukkan bahwa realisasi tingkat kepuasan layanan Tata Usaha telah mencapai target IKI yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,21, atau persentase capaian kinerja sebesar 101,86%.

Berdasarkan Kriteria Ukuran Keberhasilan dengan menggunakan Interval Skor Rata-rata *Average* Kategori gambaran Kinerja Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2024 dapat diketahui dari Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan menggunakan *Metode Scoring* yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) Kategori Kinerja yaitu :

1. (Capaian > 100%) Sangat Berhasil
2. (Capaian 80% s.d. 100%) Berhasil
3. (Capaian 60% s.d. 79%) Cukup Berhasil
4. (Capaian < 60%) Kurang Berhasil

Dari Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura diperoleh nilai rata-rata tingkat kepuasan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap Layanan Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 3,21 Skala Likert. Dengan capaian realisasi kinerja mencapai: 101,86% sehingga dikategorikan “sangat berhasil”.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada TA 2024 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp Rp 125.811.622.000,-, namun sebagian anggaran tersebut diblokir karena *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp 16.025.000.000,-; Blokir Reguler sebesar Rp 97.250.000,- dan Penghematan/Blokir perjalanan sebesar Rp 1.000.000.000,- sehingga total alokasi Pagu menjadi Rp 108.689.372.000,-. Realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 sebesar Rp 107.723.448.784 atau mencapai 85,62% dari Pagu Rp 125.811.622.000 (pusat dan daerah). Apabila memperhitungkan blokir anggaran maka realisasi mencapai 99,11%. Rincian realisasi anggaran per output dapat dilihat pada Table 30.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Direktorat PPHH T.A. 2024

No	Nama Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi Keuangan (SP2D)		Total Blokir (Rp.)	Jika Memperhitungkan Blokir
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		Realisasi (%)
1	5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	2.500.000.000	899.583.492	35,98	1.596.527.000	99,57
2	5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	12.000.000.000	11.744.118.594	97,87	248.593.000	99,94
3	5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	5.000.000.000	4.722.856.946	94,46	220.228.000	98,81
4	5887.AFA.021 Peraturan/Norma/ Pedoman	1.000.000.000	59.245.320	5,92	940.642.000	99,81
5	5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	2.859.000.000	2.718.757.134	95,09	60.000.000	97,13
6	5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	3.000.000.000	1.896.927.266	63,23	1.062.646.000	97,91
7	5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	3.500.000.000	1.550.482.408	44,30	1.941.488.000	99,48
8	5887.QDD.021 Kelompok Tani terlatih GAP	3.300.000.000	3.088.705.088	93,60	192.063.000	99,38
9	5887.QDD.022 Kelompok Tani Terlatih GHP	1.200.000.000	1.093.927.050	91,16	94.485.000	98,95
10	5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	31.352.622.000	21.050.997.819	67,14	10.048.494.000	98,81

No	Nama Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi Keuangan (SP2D)		Total Blokir (Rp.)	Jika Memperhitungkan Blokir
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		Realisasi (%)
11	5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	7.400.000.000	7.291.059.606	98,53	39.798.000	99,06
12	5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	5.000.000.000	4.857.979.421	97,16	0	97,16
13	5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	44.400.000.000	43.590.218.669	98,18	536.167.000	99,38
14	5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	3.300.000.000	3.158.589.971	95,71	141.119.000	99,99
	TOTAL	125.811.622.000	107.723.448.784	85,62	17.122.250.000	99,11

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN per tanggal 24 Januari 2025

Pagu Anggaran di pusat adalah senilai Rp 77.602.622.000 dengan nilai blokir senilai Rp 17.062.250.000. Realisasi anggaran untuk satker pusat senilai Rp 60.540.372.000 atau mencapai 77,67% dari Pagu. Apabila memperhitungkan blokir anggaran maka realisasi anggaran di pusat mencapai 99,57%. Sedangkan anggaran di daerah adalah senilai Rp 48.209.000.000 dengan nilai blokir senilai Rp 60.000.000. Realisasi anggaran untuk satker daerah senilai Rp 47.445.733.547 atau mencapai 98,42% dari Pagu. Apabila memperhitungkan blokir anggaran maka realisasi anggaran di daerah mencapai 98,54%. Kegiatan di daerah dibagi menjadi dua yaitu Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi. Alokasi Pagu untuk kegiatan TP sebesar Rp 77.602.622.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.277.715.237 atau mencapai 98,56%. Alokasi Pagu untuk kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp 6.909.000.000 dengan nilai blokir senilai Rp 60.000.000. Realisasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp 6.739.139.272 atau mencapai 97,54% dari Pagu. Apabila memperhitungkan blokir anggaran maka realisasi anggaran Dekonsentrasi mencapai 98,40%. Kegiatan Tugas Pembantuan terdiri dari Fasilitas Sarana Pascapanen Hortikultura, Sarana Pengolahan Hortikultura dan Prasarana Pascapanen Hortikultura. Kegiatan Dekonsentrasi terdiri dari Informasi Pasar Komoditas Hortikultura, Kelompok Tani terlatih GAP, dan Kelompok Tani Terlatih GHP.

Tabel 31. Realisasi Anggaran Direktorat PPHH T.A. 2024

No	KEWENANGAN	Pagu	Realisasi Keuangan (SP2D)		Total Blokir (Rp.)	Jika Memperhitungkan Blokir
		(Rp.)	(Rp.)	(%)		Realisasi (%)
1	PUSAT	77.602.622.000	60.277.715.237	77,67	17.062.250.000	99,57
2	DAERAH	48.209.000.000	47.445.733.547	98,42	60.000.000	98,54
	Tugas Pembantuan	41.300.000.000	40.706.594.275	98,56	0	98,56
	Dekonsentrasi	6.909.000.000	6.739.139.272	97,54	60.000.000	98,40
	TOTAL	125.811.622.000	107.723.448.784	85,62	17.122.250.000	99,11

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN per tanggal 24 Januari 2025

Tabel 32. Realisasi Fisik Direktorat PPHH T.A. 2024

No.	Nama Rincian Output (RO)	Volume			
		Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Versi OMSPAN	
				Realisasi Fisik (Satuan)	% Realisasi Fisik
1	5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Produk	1.000	1.327 ^{**})	132,70
2	5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	85 ^{**})	212,50
3	5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	Promosi	5	5	100,00
4	5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	1 ^{*)}	10,00
5	5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	205	205	100,00
6	5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	Unit	30	30	100,00
7	5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	Produk	100	32 ^{*)}	32,00
8	5887.QDD.021 Kelompok Tani terlatih GAP	Kelompok Masyarakat	110	110	100,00
9	5887.QDD.022 Kelompok Tani Terlatih GHP	Kelompok Masyarakat	40	40	100,00
10	5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	635	522 ^{*)}	82,20
11	5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	185	184 ^{*)}	99,46
12	5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	1	1	100,00
13	5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	184 ^{*)}	99,46
14	5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	20	20	100,00

Keterangan :

^{*)} Realisasi lebih kecil daripada target

^{**)} Realisasi lebih besar daripada target

Pengukuran kinerja Direktorat PPHH T.A. 2024 Registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura dengan pagu anggaran Rp 2.500.000.000 terealisasi senilai Rp 899.583.492 (35,98%). Pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran senilai Rp 1.596.527.000,-. Apabila memperhitungkan adanya blokir anggaran maka realisasi mencapai 99,57%. Realisasi fisik untuk registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura adalah sebesar 1.327 produk dari target 1.000 produk. Realisasi dapat melebihi target karena adanya kegiatan percepatan ekspor

mangga ke Jepang dan durian ke China. Sesuai dengan ketentuan, produk hortikultura yang akan diekspor ke China dan Jepang harus berasal dari kebun yang sudah diregistrasi. Dengan adanya kegiatan percepatan ekspor tersebut, Direktorat PPHH dipacu untuk menambah jumlah kebun yang diregistrasi dengan kondisi alokasi anggaran yang dikurangi. Untuk itu, Direktorat PPHH mengambil langkah strategis dengan melakukan metode *fast registration*. Metode ini merupakan inovasi dari metode registrasi kebun reguler. Dalam metode ini petani yang akan diregistrasi telah disiapkan terlebih dahulu oleh PPL dan dipastikan membawa persyaratan kelengkapan registrasi yang diminta. Untuk selanjutnya petani dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dilakukan pendataan dan pengelompokan untuk penilaian kondisi kebun. Dengan demikian proses registrasi dapat lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja Direktorat PPHH TA. 2024 untuk RO Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan dengan anggaran Rp 12.000.000.000 terealisasi senilai Rp. 11.744.118.594 (97,87%). Apabila memperhitungkan adanya blokir anggaran sebesar Rp 248.593.000 maka realisasi anggaran mencapai 99,94%. Untuk target output sebanyak 40 kegiatan terealisasi sebanyak 85 kegiatan, dikarenakan terjadi penambahan alokasi kegiatan untuk bimtek peningkatan kapasitas petani/pelaku usaha.

Promosi produk hortikultura dengan anggaran Rp 5.000.000.000 terealisasi senilai Rp 4.722.856.772 atau mencapai 94,46% dari pagu. Apabila memperhitungkan adanya pemotongan perjalanan sebesar Rp 220.228.000 maka realisasi anggaran mencapai 98,81%. Untuk target output sebanyak 5 promosi terealisasi 5 promosi.

Pengukuran kinerja Direktorat PPHH TA. 2024 untuk RO Peraturan, Norma dan Pedoman dengan jumlah anggaran Rp 1.000.000.000 terealisasi senilai Rp 59.245.320 (5,92%) dikarenakan adanya blokir anggaran sebesar Rp. 940.000.000. Apabila memperhitungkan blokir anggaran maka realisasi anggaran mencapai 99,81%. Untuk target output sebanyak 10 NSPK terealisasi 1 NSPK dikarenakan adanya blokir anggaran sehingga target output dari RO Peraturan, Norma, dan Pedoman tidak tercapai.

Informasi pasar Produk hortikultura dengan anggaran Rp 2.859.000.000 dapat terealisasi senilai Rp 2.799.000.000 atau mencapai 95,09% dari pagu. Apabila memperhitungkan blokir reguler sebesar 60.000.000 maka realisasi anggaran mencapai 97,13%. Target output sebanyak 205 layanan terealisasi sebanyak 205 layanan.

Sarana Pemasaran dengan anggaran Rp 3.000.000.000 terealisasi senilai Rp 1.896.927.266 atau mencapai 63,23% dari pagu. Apabila memperhitungkan adanya blokir AA sebesar Rp 910.000.000 dan pemotongan perjalanan sebesar Rp 153.646.000 maka realisasi anggaran mencapai 97,91%. Untuk target output sebanyak 30 unit terealisasi sebanyak 30 unit.

Pengukuran kinerja Direktorat PPHH T.A. 2024 untuk RO Sertifikasi Produk Hortikultura dari target 100 produk realisasi fisik sebanyak 32. Kondisi tersebut disebabkan adanya

blokir anggaran 2024, sehingga anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk mensertifikasi 32 produk. Pagu anggaran untuk Sertifikasi Produk sebesar Rp 3.500.000.000 terealisasi senilai Rp 1.550.482.408 (44,30%). Pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran senilai Rp 1.941.488.000. Apabila memperhitungkan adanya blokir anggaran maka realisasi mencapai 99,48%. Anggaran sertifikat produk terbagi menjadi dua, yaitu Sertifikasi Produk Hortikultura (Organik) dan Sertifikasi Produk Hortikultura (Olahan).

Sertifikasi organik merupakan serangkaian proses penilaian kesesuaian yang menyatakan bahwa suatu produk pertanian telah diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik yang telah terakreditasi. Fasilitas sertifikasi organik bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik. Pada tahun 2024, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Pihak Ketiga (Lembaga Sertifikasi Organik/ LSO). Output dari kegiatan ini adalah Surat Keterangan Sertifikasi Organik dan atau Sertifikat Organik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi KAN. Sampai dengan bulan Desember 2024, fasilitas sertifikasi organik telah diberikan kepada 22 Petani/Kelompok Tani. Provinsi penerima fasilitas sertifikasi organik adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jawa Tengah dan Riau.

Sertifikasi produk olahan hortikultura merupakan salah satu program Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura untuk peningkatan daya saing UMKM Hortikultura. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura telah memilih 10 UMKM Hortikultura berdasarkan hasil klasterisasi UMKM level berkembang dan maju dan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau Good Manufacturing Practices (GMP) untuk mendapat fasilitas produk olahan hortikultura dalam bentuk HACCP untuk mendukung nilai tambah dan daya saing UMKM Hortikultura Berikut merupakan kelompok yang ditargetkan mendapat sertifikat HACCP:

Tabel 33. Kelompok Penerima Fasilitas Sertifikasi HACCP T.A. 2024

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Kelompok
Tahap I			
1	Jawa Barat	Kab Bandung	KT Buruan Kriuk Mengger
2	Jawa Barat	Subang	Alam Sari
3	Jawa Tengah	Purbalingga	KT Mugi Lestari
4	Jawa Tengah	Purbalingga	KT Kerta Raharja
5	Jawa Tengah	Wonosobo	KT Bangun Suruhan
6	Jawa Tengah	Brebes	KT Sido Makmur
Tahap II			
7	Banten	Pandeglang	KWT Sekar Tani
8	Sulsel	Bantaeng	KT Radja Nanas
9	Gorontalo	Kota Gorontalo	IKM Putri
10	Gorontalo	Kota Gorontalo	IKM Dahlia

Proses sertifikasi HACCP sendiri terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah: Pra Audit – Audit Stage I (Audit Tahap I) – Perbaikan – Audit Stage II (Audit tahap II). Saat ini, UMKM Hortikultura yang berada di Tahap I pada program sertifikasi HACCP telah mendapat sertifikatnya, kelompok tersebut adalah :

1. Alam Sari
2. KT Mugi Lestari
3. KT Kerta Raharja
4. KT Bangun Suruhan
5. KT Sido Makmur
6. KT Buruan Kriuk Mengger

Sedangkan, untuk keempat UMKM Hortikultura lainnya yang berada pada sertifikasi HACCP tahap II saat ini telah terbit Sertifikat HACCP. UMKM Hortikultura tersebut adalah :

1. KWT Sekar Tani
2. KT Radja Nanas
3. IKM Putri
4. IKM Dahlia

Seluruh kegiatan Sertifikasi Produk Olahan telah terealisasi. Adapaun beberapa kendala selama kegiatan adalah sebagai berikut: untuk KT Radja Nanas, saat ini telah terbit surat rekomendasi untuk penerbitan HACCP, keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa perbaikan oleh KT Radja Nanas. Selain itu, terdapat kendala pada KT Buruan Kriuk Mengger, terdapat kendala koordinasi dan komunikasi selama proses perbaikan dan sertifikasi kelompok kurang koordinatif.

Kelompok Tani terlatih GAP dengan pagu anggaran Rp 3.300.000.000, terealisasi senilai Rp 3.088.705.088 sehingga persentase capaian realisasi anggaran mencapai 93,60%. Pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp 192.063.000 apabila memperhitungkan adanya blokir persentase realisasi anggaran sebesar 99,38%. Realisasi fisik untuk Kelompok tani terlatih GAP sebesar 110 kelompok masyarakat dari target 110 kelompok masyarakat, sehingga terealisasi 100%. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memfasilitasi Kelompok Masyarakat untuk mendapatkan bimbingan teknis mengenai penerapan GAP yang dilaksanakan dalam format Sekolah Lapang (SL). Satu paket Penerapan GAP dilaksanakan 5 kali pertemuan tatap muka. Kegiatan Penerapan GAP ini merupakan sarana bagi para petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan petugas. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman. Pelaksanaan Penerapan GAP dipandu oleh petugas kabupaten dengan peserta petani penerima manfaat yang masing-masing memiliki komitmen untuk menyampaikannya kepada petani di lingkungannya sehingga diharapkan

akan berdampak luas terhadap peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura. Pada Tahun 2024, Sekolah Lapang GAP telah dilaksanakan di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Gorontalo. Lingkup komoditas untuk Sekolah Lapang GAP bervariasi, diantaranya durian, mangga, salak, manggis, alpukat, jeruk, semangka, melon, kelengkeng, nanas, pisang, buah naga, jahe, bawang merah, cabai, kentang, sayuran daun, dan tomat. Tema Sekolah Lapang GAP disesuaikan dengan kebutuhan petani serta komoditas yang ditanam.

Kelompok Tani terlatih GHP dengan pagu anggaran Rp 1.200.000.000, terealisasi senilai Rp 1.093.927.050 sehingga persentase capaian realisasi anggaran sebesar 91,16%. Pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp 94.485.000, apabila memperhitungkan adanya blokir realisasi anggaran sebesar 98,95%. Realisasi fisik untuk Kelompok tani terlatih GAP sebesar 40 kelompok masyarakat dari target 40 kelompok masyarakat sehingga terealisasi 100%. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memfasilitasi Kelompok Masyarakat melalui kegiatan Penerapan Good Handling Practices (GHP) dengan Metode Sekolah Lapang. Satu paket Penerapan GHP dilaksanakan 5 kali pertemuan tatap muka. Pelaksanaan Penerapan GHP dipandu oleh petugas kabupaten dengan peserta petani penerima manfaat yang masing-masing memiliki komitmen untuk menyampaikannya kepada petani di lingkungannya sehingga diharapkan akan berdampak luas terhadap upaya susut hasil. Sekolah Lapang GHP akan membantu petani untuk memperpanjang kesegaran, mencegah menurunnya mutu hasil panen, menekan tingkat kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Pada Tahun 2024, Sekolah Lapang GHP telah dilaksanakan di beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali, Bengkulu. Lingkup komoditas untuk Sekolah Lapang GAP bervariasi, diantaranya pisang, jeruk, salak, cabai, bawang merah. Tema Sekolah Lapang GHP disesuaikan dengan kebutuhan petani serta komoditas yang ditanam.

Sarana pascapanen hortikultura dari target 635 unit terealisasi sebanyak 522 unit (82,20%). Realisasi keuangan Sarana Pascapanen Hortikultura dari pagu anggaran Rp 31.352.622.000 terealisasi senilai Rp 21.050.997.819 (67,14%), pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran sebesar Rp 10.048.494.000, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 98,81% apabila memperhitungkan blokir.

Sarana pengolahan hortikultura dari target 185 unit terealisasi sebanyak 184 unit (99,46%). Realisasi keuangan Sarana Pengolahan Hortikultura dari pagu anggaran Rp 7.400.000.000

teralisasi senilai Rp 7.291.059.606 (98,53%), pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran karena penghematan perjalanan sebesar Rp 39.798.000, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 99,06% apabila memperhitungkan blokir.

Prasarana pascapanen hortikultura dari target 185 unit terealisasi sebanyak 184 unit (99,46%). Realisasi keuangan Sarana Pengolahan Hortikultura dari pagu anggaran Rp 44.400.000.000 terealisasi senilai Rp 43.590.218.669 (98,18%), pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran karena *Automatic Adjustment*, Blokir reguler dan penghematan perjalanan dengan total sebesar Rp 536.167.000, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 99,38% apabila memperhitungkan blokir.

Prasarana pengolahan hortikultura dari target 20 unit terealisasi sebanyak 20 unit (100%). Realisasi keuangan Sarana Pengolahan Hortikultura dari pagu anggaran Rp 3.300.000.000 terealisasi senilai Rp 3.158.589.971 (95,71%), pada kegiatan ini terdapat blokir anggaran karena *Automatic Adjustment* ardan penghematan perjalanan dengan total sebesar Rp 141.119.000, sehingga persentase realisasi anggaran sebesar 99,99% apabila memperhitungkan blokir.

Kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project/HDDAP* dengan anggaran Rp 5.000.000.000 terealisasi senilai Rp. 4.857.979.421 (97,16%). Pada tahun anggaran 2024, aktivitas kegiatan proyek HDDAP yang dilaksanakan merupakan tahap persiapan yang terdiri dari penguatan *National Project Management Unit* (NPMU) dan *District Project Implementation Unit* (DPIU). DPIU 87% dan NPMU 97%. Pada tahun anggaran 2024 perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan identifikasi, sosialisasi dan koordinasi. Selain itu, *National Project Management Unit* (NPMU) dalam kurun 2024 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, penyusunan OWP dan AWP, Koordinasi pengawalan pengadaan jasa konsultan, Rapat koordinasi penanggung jawab komponen dan penanggung jawab kabupaten, pertemuan penyusunan dan pencetakan pedoman HDDAP, *Kick Off Meeting*, FGD kelembagaan, FGD pengembangan Sumber Daya Manusia, sosialisasi proyek di tingkat kabupaten, studi banding ke proyek sejenis, rapat-rapat teknis terkait pengadaan, reimbursement, persiapan pelaksanaan HDDAP, konsolidasi dan koordinasi internal, pelatihan piloting KoltiTrace, inception mission, pelatihan pengelolaan keuangan, pertemuan koordinasi dengan ADB dan IFAD, Review mission, redesign HDDAP, dan *private sector engagement*. Keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan keberhasilan HDDAP

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran Efisiensi Sumber Daya Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dihitung dengan cara menghitung penghematan anggaran dalam mencapai Rincian Output (RO) kegiatan dengan rumus sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E_{RO} = efisiensi RO Tingkat Satuan Kerja
- $AARO_i$ = Alokasi Anggaran RO_i
- $RARO_i$ = Realisasi Anggaran RO_i
- CRO_i = Capaian Anggaran RO_i

Perhitungan efisiensi dihitung dua kali dengan memperhitungkan blokir dan tanpa memperhitungkan blokir. Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada setiap RO yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel 34 dan Tabel 35.

Tabel 34. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Output Kegiatan Tahun 2024 dengan Mengeluarkan Blokir

Nama Rincian Output (RO)	Satuan	Fisik			Keuangan (dengan mengeluarkan Blokir)		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Produk	1.000	1.327	132,70	903.473.000	899.583.492	1.198.908.671	299.325.179
5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	85	212,50	11.751.407.000	11.744.118.594	24.971.739.875	13.227.621.281
5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	Promosi	5	5	100,00	4.779.772.000	4.722.856.946	4.779.772.000	56.915.054
5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	1	10,00	59.358.000	59.245.320	5.935.800	- 53.309.520
5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	205	205	100,00	2.799.000.000	2.718.757.134	2.799.000.000	80.242.866
5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	Unit	30	30	100,00	1.937.354.000	1.896.927.266	1.937.354.000	40.426.734
5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	Produk	100	32	32,00	1.558.512.000	1.550.482.408	498.723.840	- 1.051.758.568
5887.QDD.021 Penerapan GAP	Kelompok Masyarakat	110	110	100,00	3.107.937.000	3.088.705.088	3.107.937.000	19.231.912
5887.QDD.022 Penerapan GHP	Kelompok Masyarakat	40	40	100,00	1.105.515.000	1.093.927.050	1.105.515.000	11.587.950
5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	635	522	82,20	21.304.128.000	21.050.997.819	17.512.999.710	- 3.537.998.109
5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	185	184	99,46	7.360.202.000	7.291.059.606	7.320.417.124	29.357.518
5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	1	1	100,00	5.000.000.000	4.857.979.421	5.000.000.000	142.020.579
5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	184	99,46	43.863.833.000	43.590.218.669	43.626.731.200	36.512.531

Nama Rincian Output (RO)	Satuan	Fisik			Keuangan (dengan mengeluarkan Blokir)		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	20	20	100,00	3.158.881.000	3.158.589.971	3.158.881.000	291.029
JUMLAH					108.689.372.000	107.723.448.784	117.023.915.221	9.300.466.437
Efisiensi (%)					$\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$			8,56
Nilai Efisiensi (%)					50% + E/20 X 50			71,39

Tabel 35. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Output Kegiatan Tahun 2024

Nama Rincian Output (RO)	Satuan	Fisik			Keuangan		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
					125.811.622.000	107.723.448.784		
5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Produk	1.000	1.327	132,70	2.500.000.000	899.583.492	3.317.500.000	2.417.916.508
5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	85	212,50	12.000.000.000	11.744.118.594	25.500.000.000	13.755.881.406
5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	Promosi	5	5	100,00	5.000.000.000	4.722.856.946	5.000.000.000	277.143.054
5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	1	10,00	1.000.000.000	59.245.320	100.000.000	40.754.680
5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	205	205	100,00	2.859.000.000	2.718.757.134	2.859.000.000	140.242.866
5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	Unit	30	30	100,00	3.000.000.000	1.896.927.266	3.000.000.000	1.103.072.734
5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	Produk	100	32	32,00	3.500.000.000	1.550.482.408	1.120.000.000	- 430.482.408
5887.QDD.021 Penerapan GAP	Kelompok Masyarakat	110	110	100,00	3.300.000.000	3.088.705.088	3.300.000.000	211.294.912
5887.QDD.022 Penerapan GHP	Kelompok Masyarakat	40	40	100,00	1.200.000.000	1.093.927.050	1.200.000.000	106.072.950
5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	635	522	82,20	31.352.622.000	21.050.997.819	25.773.336.510	4.722.338.691
5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	185	184	99,46	7.400.000.000	7.291.059.606	7.360.000.000	68.940.394
5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	1	1	100,00	5.000.000.000	4.857.979.421	5.000.000.000	142.020.579
5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	184	99,46	44.400.000.000	43.590.218.669	44.160.000.000	569.781.331
5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	20	20	100,00	3.300.000.000	3.158.589.971	3.300.000.000	141.410.029
JUMLAH					125.811.622.000	107.723.448.784	130.989.836.510	23.266.387.726
Efisiensi (%)					$\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$			18,49
Nilai Efisiensi (%)					50% + E/20 X 50			96,23

Perhitungan efisiensi pada Tabel 34 dihitung dengan memperhitungkan adanya blokir anggaran, sedangkan pada Tabel 35 efisiensi dihitung tanpa memperhitungkan adanya blokir anggaran. Berdasarkan Tabel 34, diketahui bahwa penggunaan anggaran terhadap capaian RO diperoleh efisiensi sebesar 8,56% apabila memperhitungkan adanya blokir anggaran. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0-100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi berdasarkan lampiran PMK Nomor 22 Tahun 2021 agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0-100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \{(E/20) \times 50\}$$

dimana NE = Nilai efisiensi dan E = Efisiensi

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 adalah sebesar 71,39% (dengan memperhitungkan adanya blokir). Sedangkan berdasarkan Tabel 35, diketahui bahwa penggunaan anggaran terhadap capaian RO diperoleh efisiensi sebesar 18,49% dengan nilai efisiensi sebesar 96,23% apabila tanpa memperhitungkan blokir. Semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai RO maksimal berarti nilai efisiensi semakin tinggi, dengan kata lain jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian RO kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ini merupakan bagian dari pelaksanaan SAKIP, sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat PPHH selaku penerima mandat negara dalam melaksanakan pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2024. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 6 (enam) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura; 2) Nilai ekspor untuk produk hortikultura; 3) Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura; 4) Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional; 5) Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPHH; dan 6) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Sedangkan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori berhasil yaitu Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan

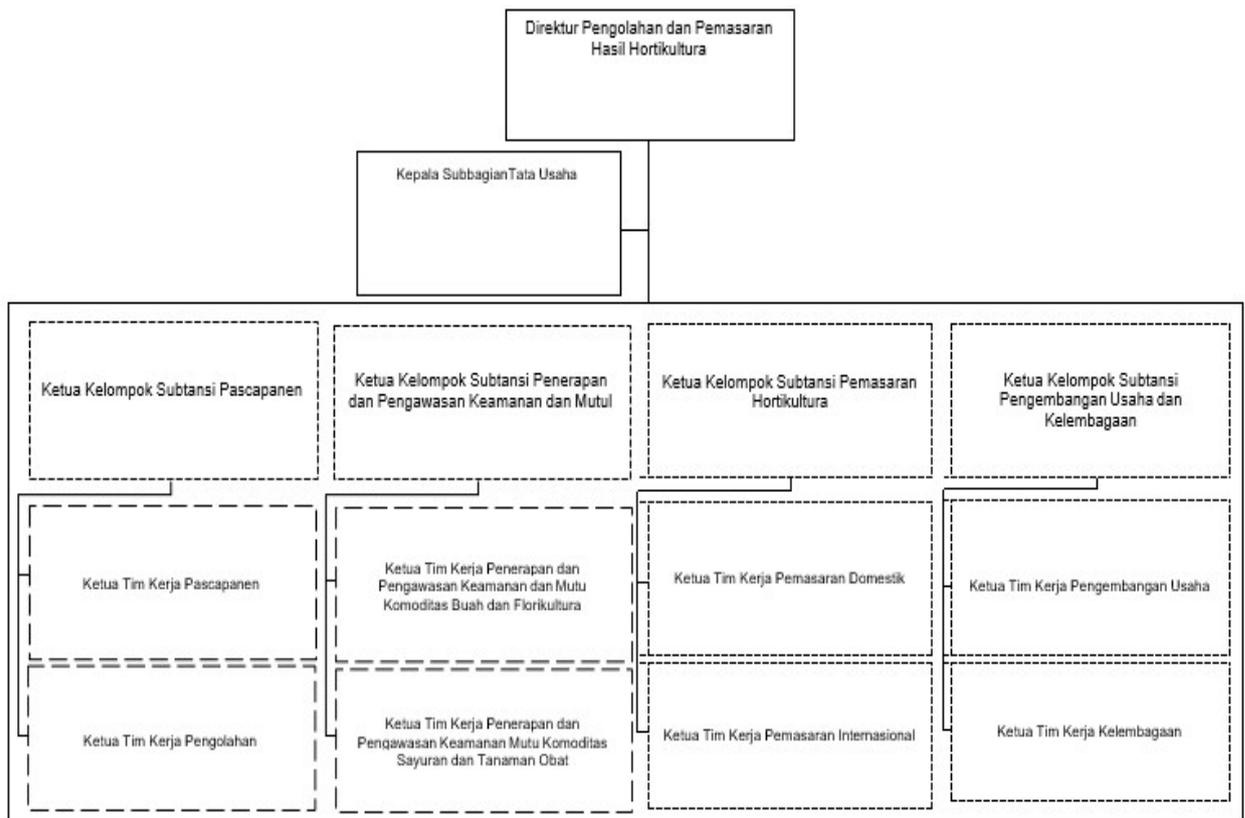
Untuk tahun anggaran 2024, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp 125.811.622.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp 17.122.250.000,-. Serapan APBN Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sudah mencapai Rp 107.723.448.784,- atau 85,62% dari pagu atau 99,11% tanpa memperhitungkan blokir.

Keberhasilan program kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura ditentukan oleh peran seta petani/pelaku usaha, Institusi/Lembaga/Kementerian di luar Kementan, sektor swasta maupun Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja Direktorat PPHH kedepan dan untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (Satker) maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, oleh karena kualitas SDM pengelola kegiatan hortikultura baik di tingkat Pusat dan Daerah harus ditingkatkan. Di samping itu, pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder harus bersama-sama berkoordinasi, bersinergi untuk kelanjutan pelaksanaan program yang penuh tantangan ini sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan pertanian di Indonesia dan berkontribusi membantu kesejahteraan petani.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura



Lampiran 2. Data Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pascapanen Satker Daerah TA 2024

No	Provinsi/ Kabupaten	Kewenangan	PRASARANA PASCAPANEN		SARANA PASCAPANEN		SARANA PENGOLAHAN	
			Target Volume (Unit)	Realisasi Fisik (Unit)	Target Volume (Unit)	Realisasi Fisik (Unit)	Target Volume (Unit)	Realisasi Fisik (Unit)
1	Aceh	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
2	Sumatera Utara	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
3	Sumatera Barat	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
4	Riau	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
5	Jambi	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
6	Sumatera Selatan	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
7	Lampung	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
8	Jawa Barat	TP PROVINSI	9	8	9	9	9	9
9	Jawa Tengah	TP PROVINSI	15	15	15	15	15	15
10	DI. Yogyakarta	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
11	Jawa Timur	TP PROVINSI	11	11	11	11	11	11
12	Kalimantan Barat	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
13	Kalimantan Tengah	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
14	Kalimantan Selatan	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
15	Kalimantan Timur	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
16	Sulawesi Utara	TP PROVINSI	1	1	1	1	1	1
17	Sulawesi Tengah	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
18	Sulawesi Selatan	TP PROVINSI	5	5	5	5	5	5
19	Sulawesi Tenggara	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
20	Bali	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
21	Nusa Tenggara Barat	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
22	Nusa Tenggara Timur	TP PROVINSI	3	3	3	3	3	3
23	Maluku	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
24	Maluku Utara	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
25	Banten	TP PROVINSI	4	4	4	4	4	4
26	Bangka Belitung	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
27	Gorontalo	TP PROPINSI	3	3	3	3	3	3
28	Sulawesi Barat	TP PROVINSI	1	1	1	1	1	1
29	Kalimantan Utara	TP PROVINSI	2	2	2	2	2	2
30	Papua	TP PROVINSI	1	1	1	1	1	1
31	Kepahiang	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
32	Cianjur	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
33	Tabanan	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
34	Banyuwangi	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
35	Sinjai	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
36	Bantaeng	TP KAB /KOTA	1	1	1	1	1	1
37	Enrekang	TP KAB/KOTA	1	1	1	1	1	1
	Jumlah		118	117	118	118	118	118

Lampiran 3. Data Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pascapanen Satker Pusat TA 2024

No	Provinsi/Kabupaten	Kewenangan	PRASARANA PASCAPANEN		SARANA PASCAPANEN		SARANA PENGOLAHAN
			Target Volume (Unit)	Realisasi Fisik (Unit)	Target Volume (Unit)	Realisasi Fisik (Unit)	Target Volume (Unit)
1	Aceh	PUSAT	3	3	13	13	3
2	Sumatera Utara	PUSAT	1	1	10	10	1
3	Sumatera Barat	PUSAT	1	1	8	8	1
4	Jambi	PUSAT	1	1	9	9	1
5	Sumatera Selatan	PUSAT	1	1	10	10	1
6	Lampung	PUSAT	7	7	29	29	7
7	Jawa Barat	PUSAT	13	13	67	67	13
8	Jawa Tengah	PUSAT	7	7	67	67	7
9	DI. Yogyakarta	PUSAT	-	-	4	4	-
10	Jawa Timur	PUSAT	11	11	51	51	11
11	Kalimantan Barat	PUSAT	3	3	12	12	3
12	Kalimantan Tengah	PUSAT	1	1	11	11	1
13	Kalimantan Selatan	PUSAT	-	-	4	4	-
14	Kalimantan Timur	PUSAT	1	1	4	4	1
15	Sulawesi Utara	PUSAT	-	-	3	3	-
16	Sulawesi Selatan	PUSAT	4	4	29	29	4
17	Sulawesi Tenggara	PUSAT	1	1	14	14	1
18	Bali	PUSAT	1	1	4	4	1
19	Nusa Tenggara Barat	PUSAT	2	2	8	8	2
20	Nusa Tenggara Timur	PUSAT	3	3	16	16	3
21	Maluku	PUSAT	2	2	8	8	2
22	Maluku Utara	PUSAT	-	-	3	3	-
23	Banten	PUSAT	1	1	7	7	1
24	Bangka Belitung	PUSAT	1	1	1	1	1
25	Gorontalo	PUSAT	-	-	4	4	-
26	Sulawesi Barat	PUSAT	1	1	4	4	1
27	Papua Selatan	PUSAT	1	1	5	5	1

Lampiran 4. Data Penerima Fasilitas Sertifikasi Hortikultura (Organik) Satker Pusat TA 2024

PROVINSI	NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN	NAMA KETUA KELOMPOK	KABUPATEN/ KOTA	KOMODITAS
Jawa Barat	Taruna Bukit Muda Tani	Riben Sumpena	Bandung	bawang merah, cabai keriting, kubis, dan sayuran daun
	P4S Bumi Mekar Laksana	H Budi Prayitno	Bandung	Sayuran Hijau
	Giri Putri	Yudi Permana	Bandung Barat	Sayuran [horenzo].
	Seni Tani	Vanya Febriyanti	Kota Bandung	Sayuran Daun [pagoda, pakcoy, salada romaine, edamame]
	Karya Tugu Mandiri	Kamal	Bogor	Sayuran Daun
Sumatera Utara	Prima Makmur	Lasta Sembiring	Kota Medan	Sayuran Hijau [pakcoy, kailan, baby bayam]
	Tantan Jaya Farm	Sentana Nasution	Kota Medan	Sayuran [sawi, kangkung, bayam, pakcoy]
Jawa Timur	Setia Tani Jaya 2	M. Jamaluddin	Bondowoso	Mangga dan Kunyit
	Setia Tani Jaya 7	Abdullah	Bondowoso	Mangga dan Kunyit
	Gapoktan Sulek Raya	Mustafa	Bondowoso	Alpukat
Kalimantan Barat	Tiga Saudara	Alriyadi	Mempawah	Nenas
	Maju Bersama	Khioroyyah	Kubu Raya	Nenas
	Harapan Jaya	Nasuri	Kubu Raya	Nenas
	Mandiri Sejahtera	Suhar	Kubu Raya	Nenas
Sumatera Selatan		Fiqih Hikmawan	Lubuk Linggau	Durian dan Alpukat
	Mangkuanom	Endang Setiono	Pagar Alam	Jeruk dan Pepaya
Bengkulu	Sidomulyo	Ansori	Kepahiang	Bawang Merah dan Cabai
	Tani Maju	Andri Pratama	Kepahiang	Bawang Merah, Cabai, Timun, Kol, dan Jagung
Jawa Tengah	KWT Sekar Tani Nyiur Hijau	Nunuk Kuswatun Khasanah	Magelang	Sayuran
Riau		Imam Muyasir	Siak	Lemon
		W. Zainal Abidin	Dumai	Cabe dan Sayuran
Bengkulu	Jaya	Paijo	Kepahiang	Sayuran

Lampiran 5. Penerima Fasilitas Penerapan GAP Satker Daerah TA 2024

NO	PROVINSI	TARGET	REALISASI
1	Pusat	10	10
2	Jawa Tengah	4	4
3	DI Yogyakarta	4	4
4	Jawa Timur	6	6
5	Aceh	4	4
6	Sumatera Utara	6	6
7	Sumatera Barat	4	4
8	Riau	4	4
9	Jambi	5	5
10	Sumatera Selatan	5	5
11	Lampung	5	5
12	Kalimantan Barat	4	4
13	Kalimantan Tengah	3	3
14	Kalimantan Selatan	3	3
15	Sulawesi Utara	5	5
16	Sulawesi Tengah	3	3
17	Sulawesi Selatan	4	4
18	Sulawesi Tenggara	5	5
19	Maluku	2	2
20	Bali	5	5
21	NTB	4	4
22	NTT	3	3
23	Bengkulu	4	4
24	Bangka Belitung	4	4
25	Gorontalo	4	4
		110	110

Lampiran 6. Penerima Fasilitas Penerapan GHP Satker Pusat dan Daerah TA 2024

NO	PROVINSI	TARGET	REALISASI
1	Pusat	5	5
2	Jawa Barat	3	3
3	Jawa Tengah	2	2
4	DI Yogyakarta	2	2
5	Jawa Timur	3	3
6	Sumatera Utara	4	4
7	Sumatera Barat	2	2
8	Jambi	2	2
9	Lampung	3	3
10	Sulawesi Utara	2	2
11	Sulawesi Tenggara	2	2
12	Bali	6	6
13	Bengkulu	2	2
14	Banten	2	2
		40	40

Lampiran 7. Penerima Fasilitas Sarana Pemasaran

No	Provinsi
Pasar Tani	
1	Sumatera Selatan (Ogan Ilir)
2	Lampung (Pringsewu)
3	Jawa Tengah (Temanggung)
4	Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya)
5	Gorontalo (Gorontalo Utara)
6	Aceh (Kota Lhokseumawe)
Kelompok UMKM Hortikultura	
1	Gorontalo (Kota Gorontalo)
2	Bangka Belitung (Bangka Barat)
3	Jawa Timur (Kediri)
4	Jawa Tengah (Wonosobo)
5	Sulawesi Barat (Mamuju)
Mitra Champion	
1	Jawa Tengah (Pati)
2	Sulawesi Selatan (Enrekang)
Korporasi Petani Hortikultura	
1	Sumatera Utara (Batubara)
2	Sulawesi Barat (Polewali Mandar)
3	Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara)

Lampiran 8. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan PIP

PROVINSI		KABUPATEN	PIP	PROVINSI		KABUPATEN	PIP
JAWA TIMUR	1	KABUPATEN MALANG	1	DIY	1	KABUPATEN KULON PROGO	1
	2	KABUPATEN PROBOLINGGO	1		2	KABUPATEN BANTUL	1
	3	KABUPATEN BANYUWANGI	1		3	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	1
	4	KABUPATEN BLITAR	1		4	KABUPATEN SLEMAN	1
	5	KABUPATEN KEDIRI	1	BALI	1	KABUPATEN BANGLI	1
	6	KABUPATEN NGANJUK	1		2	KABUPATEN KARANGASEM	1
	7	KABUPATEN SAMPANG	1		3	KABUPATEN BULELENG	1
	8	KABUPATEN BOJONEGORO	1		4	KABUPATEN TABANAN	1
	9	KABUPATEN TUBAN	1		5	KABUPATEN GIANYAR	1
	10	KABUPATEN SITUBONDO	1		6	KABUPATEN BADUNG	1
	11	KABUPATEN LAMONGAN	1		7	KABUPATEN KLUNGKUNG	1
	12	KABUPATEN PAMEKASAN	1	LAMPUNG	1	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	1
	13	KABUPATEN PACITAN	1		2	KABUPATEN PRINGSEWU	1
	14	KABUPATEN PONOROGO	1		3	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	1
	15	KABUPATEN TRENGGALEK	1		4	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	1
JAWA TENGAH	1	KABUPATEN BREBES	1		5	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	1
	2	KABUPATEN MAGELANG	1		6	KABUPATEN PESAWARAN	1
	3	KABUPATEN TEMANGGUNG	1		7	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	1
	4	KABUPATEN SEMARANG	1	SUMSEL	1	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	1
	5	KABUPATEN WONOSOBO	1		2	KABUPATEN MUARA ENIM	1
	6	KABUPATEN REMBANG	1		3	KOTA PAGAR ALAM	1
	7	KABUPATEN BOYOLALI	1		4	KABUPATEN MUSI RAWAS	1
	8	KABUPATEN GROBOGAN	1		5	KABUPATEN BANYU ASIN	1
	9	KABUPATEN PATI	1		6	KABUPATEN OGAN ILIR	1
	10	KABUPATEN DEMAK	1		7	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	1
	11	KABUPATEN KENDAL	1	SULTENG	1	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	1
	12	KABUPATEN TEGAL	1		2	KABUPATEN SIGI	1
	13	KABUPATEN KARANGANYAR	1		3	KABUPATEN POSO	1
	14	KABUPATEN CILACAP	1		4	KOTA PALU	1
	15	KABUPATEN BANJARNEGARA	1		5	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	1
JAWA BARAT	1	KABUPATEN GARUT	1		6	KABUPATEN DONGGALA	1
	2	KABUPATEN BANDUNG	1	SULUT	1	KABUPATEN MINAHASA	1
	3	KABUPATEN CIANJUR	1		2	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	1
	4	KABUPATEN SUKABUMI	1		3	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW T	1
	5	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1		4	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	1
	6	KABUPATEN TASIKMALAYA	1		5	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	1
	7	KABUPATEN MAJALENGKA	1		6	KABUPATEN MINAHASA UTARA	1
	8	KABUPATEN CIREBON	1	NTT	1	KABUPATEN KUPANG	1
	9	KABUPATEN KUNINGAN	1		2	KABUPATEN BELU	1
	10	KABUPATEN SUMEDANG	1		3	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	1
	11	KABUPATEN BOGOR	1		4	KABUPATEN ROTE NDAO	1
SUMUT	1	KABUPATEN SIMALUNGUN	1		5	KABUPATEN MALAKA	1
	2	KABUPATEN KARO	1		6	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1
	3	KABUPATEN HUMBANG HASUNDA	1	KALSEL	1	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	1
	4	KABUPATEN MANDAILING NATA	1		2	KABUPATEN TABALONG	1
	5	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1		3	KABUPATEN TAPIN	1
	6	KABUPATEN TAPANULI UTARA	1		4	KABUPATEN TANAH LAUT	1
	7	KABUPATEN DAIRI	1		5	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	1
	8	KABUPATEN DELI SERDANG	1	RIAU	1	KABUPATEN KAMPAR	1
	9	KABUPATEN SAMOSIR	1		2	KABUPATEN SI A K	1
	10	KABUPATEN BATU BARA	1		3	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	1
SUMBAR	1	KABUPATEN SOLOK	1		4	KABUPATEN ROKAN HULU	1
	2	KABUPATEN AGAM	1		5	KABUPATEN ROKAN HILIR	1
	3	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1	GORONTALO	1	KABUPATEN BOALEMO	1
	4	KABUPATEN TANAH DATAR	1		2	KABUPATEN GORONTALO	1
	5	KABUPATEN SOLOK SELATAN	1		3	KABUPATEN POHUWATO	1
	6	KABUPATEN PASAMAN BARAT	1		4	KABUPATEN BONE BOLANGO	1
	7	KABUPATEN PESISIR SELATAN	1		5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	1
	8	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	1	KALTIM	1	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	1
	9	KABUPATEN PASAMAN	1		2	KOTA BALIKPAPAN	1
	10	KOTA PAYAKUMBUH	1		3	KABUPATEN BERAU	1
NTB	1	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1		4	KABUPATEN PASER	1
	2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1		5	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	1
	3	KABUPATEN BIMA	1	BANTEN	1	KABUPATEN PANDEGLANG	1
	4	KABUPATEN LOMBOK UTARA	1		2	KABUPATEN SERANG	1
	5	KABUPATEN LOMBOK BARAT	1		3	KABUPATEN LEBAK	1
	6	KOTA MATARAM	1		4	KABUPATEN TANGERANG	1
	7	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	1		5	KOTA CILEGON	1
	8	KABUPATEN SUMBAWA	1	KALTARA	1	KOTA TARAKAN	1
	9	KABUPATEN DOMPU	1		2	KABUPATEN NUNUKAN	1
SULSEL	1	KABUPATEN ENREKANG	1		3	KABUPATEN BULUNGAN	1
	2	KABUPATEN BANTAENG	1		4	KABUPATEN MALINAU	1
	3	KABUPATEN JENEPONTO	1		5	KABUPATEN TANA TIDUNG	1
	4	KABUPATEN BONE	1	BABEL	1	KABUPATEN BANGKA TENGAH	1
	5	KABUPATEN GOWA	1		2	KABUPATEN BANGKA	1
	6	KABUPATEN LUWU UTARA	1		3	KABUPATEN BELITUNG	1
	7	KABUPATEN WAJO	1		4	KABUPATEN BANGKA BARAT	1
	8	KABUPATEN PINRANG	1	KALBAR	1	KABUPATEN BENGKAYANG	1
	9	KABUPATEN SINJAI	1		2	KABUPATEN SINTANG	1
ACEH	1	KABUPATEN ACEH TENGAH	1		3	KABUPATEN MEMPWAH	1
	2	KABUPATEN PIDIE	1		4	KABUPATEN SANGGAU	1
	3	KABUPATEN GAYO LUES	1	SULBAR	1	KABUPATEN MAJENE	1
	4	KABUPATEN ACEH TENGGARA	1		2	KABUPATEN MAMUJU	1
	5	KABUPATEN ACEH BARAT	1		3	KABUPATEN PASANGKAYU	1
	6	KABUPATEN ACEH BESAR	1		4	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	1
	7	KABUPATEN ACEH UTARA	1	MALUKU	1	KABUPATEN MALUKU TENGAH	1
	8	KABUPATEN BENER MERIAH	1		2	KABUPATEN BURU	1
JAMBI	1	KABUPATEN KERINCI	1		3	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	1
	2	KABUPATEN MERANGIN	1		4	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	1
	3	KOTA SUNGAI PENUH	1	MALUT	1	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1
	4	KABUPATEN BUNGO	1		2	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1
	5	KABUPATEN TEBO	1		3	KABUPATEN PULAU MOROTAI	1
	6	KABUPATEN MUARO JAMBI	1	SULTRA	1	KABUPATEN KONawe	1
	7	KABUPATEN TANJUNG JABUNG	1		2	KABUPATEN KONawe UTARA	1
BENGKULU	1	KABUPATEN KEPAHANG	1		3	KABUPATEN WAKATOB I	1
	2	KABUPATEN REJANG LEBONG	1	KALTENG	1	KABUPATEN WAKAWARINGIN BARAT	1
	3	KABUPATEN BENGKULU UTARA	1		2	KABUPATEN KAPUAS	1
	4	KABUPATEN KAUR	1		3	KABUPATEN LAMANDAU	1
	5	KABUPATEN MUKOMUKO	1	PAPUA	1	KABUPATEN MERAUKE	1
	6	KABUPATEN LEBONG	1		2	KABUPATEN NABIRE	1
	7	KABUPATEN SELUMA	1	PAPUA BARAT	1	KABUPATEN MANOKWARI	1
					2	KABUPATEN KAIMANA	1
				KEPRI	1	KABUPATEN BINTAN	1
					2	KOTA B A T A M	1
						TOTAL	205

Lampiran 9. Dokumentasi Fasilitas Prasarana Pascapanen



Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan



Kab. Klaten, Jawa Tengah



Kab. PALI, Sumatera Selatan



Kab. Sambas, Kalimantan Barat



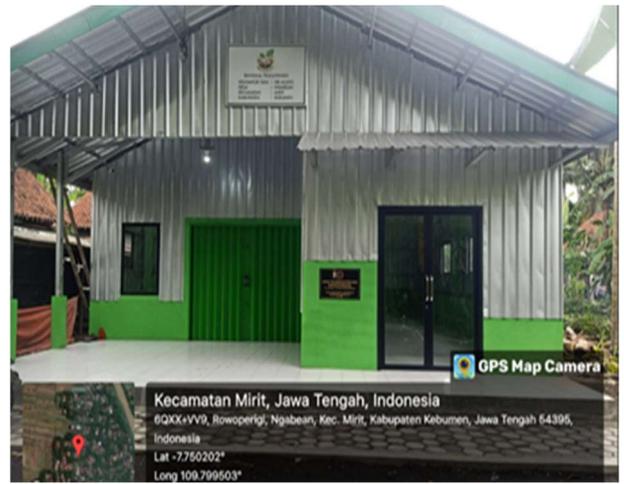
Kab. Pati, Jawa Tengah



Kab. Luwu, Sulawesi Selatan



Kab. Bogor, Jawa Barat



Kab. Kebumen, Jawa Tengah



Kab. Cilacap, Jawa Tengah



Kab. Tabanan, Bali



Kab. Kuningan, Jawa Barat



Kab Muna, Sulawesi Tenggara



Kabupaten Majalengka, Jawa Barat



Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur



Kab. Garut, Jawa Barat



Kab Ngada, NTT



Kab. Aceh Tenggara, Aceh



Kab. Magelang, Jawa Tengah



Kab. Banyuasin



Kab. Sambas



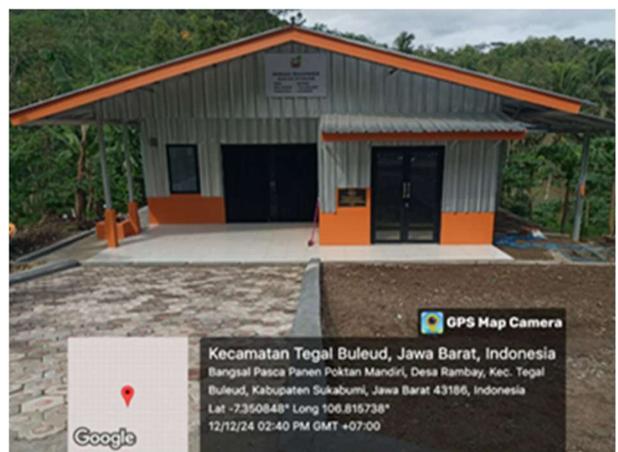
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung



Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan



Kab. Bangka Selatan



Kab. Sukabumi, Jawa Barat



Kab. Serang, Banten



Kab. Bima, NTB



Kab. Solok, Sumatera Barat



Kab. Cianjur, Jawa Barat

Lampiran 10. Dokumentasi Fasilitas Sarana Pascapanen

A. SARANA PASCAPANEN



(Meja Peniris Poktan Tajang Pammase Kab. Mamuju)



(Keranjang Panen dan Timbangan Digital Poktan Rahayu Tani I Kab. Nganjuk)



(Meja Pencuci Empon-Empon KWT Sri Tanjung Kab. Malang)



(Meja Pencuci KWT Mulia Sejahtera Kab. Blitar)



(Mesin Pencuci, Keranjang, Blower, Timbangan Digital, Trolley Poktan Agro Asyifa Kab. Magelang)





(Meja Pengemas Poktan Seullean Kab. Seram Bagian Timur)



(Keranjang Panen, Peralatan Kompor, Box Plastik Poktan Sri Rahayu Kab. Kebumen)



(Chest Freezer, Timbangan Digital, Kipas Angin KWT Sri Rejeki II Kab. Pesawaran)



(Trolley dan Timbangan Digital Kecil Poktan Anugerah Kab. Cianjur)

B. SARANA ANGKUTAN HORTIKULTURA (MOTOR RODA 3)



(Gapoktan Mandiri Bersama Kota Pontianak)



(Poktan Barugae Kab. Bone)



(Poktan Wae Nital Kab. Maluku Tengah)



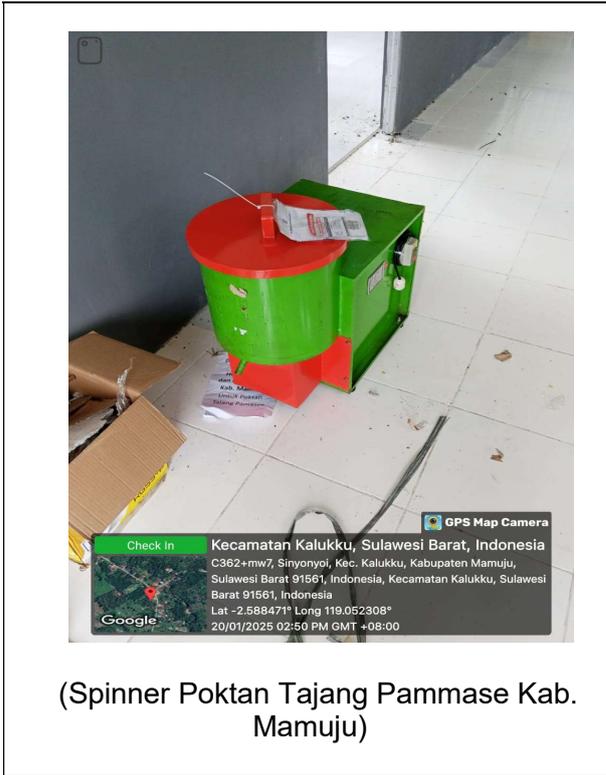
(Poktan Usaha Bersama Kab. Merauke)



Poktan Sakinah Sejahtera Kab.
Dharmasraya)



Lampiran 11. Dokumentasi Fasilitas Sarana Pengolahan





(Mesin Pengisi KWT Sri Tanjung Kab. Malang)



(Mesin Penggiling Poktan Anugerah Kab. Cianjur)



(Vacuum Frying KWT Mulia Sejahtera
Kab. Blitar)



(Mesin Penggorengan/ Pengaduk Poktan Tajang
Pammase Kab. Mamuju)

Lampiran 12. Dokumentasi Fasilitas Prasarana Pengolahan



(Poktan Lembah Manglayang Kota Bandung)



(Poktan Argomulyo IV Kab. Lumajang)



(Poktan Cipta Mandiri Kab. Pangandaran)



(Poktan Harapan Mekar II Kab. Cilacap)



(Poktan Karunia Kab. Medan)



(KWT Alam Sari Kab. Subang)

Lampiran 13. Dokumentasi Penerapan GAP TA 2024



Sekolah Lapang GAP Provinsi Jawa Tengah



Sekolah Lapang GAP Provinsi Bali



Sekolah Lapang GAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran 14. Dokumentasi Penerapan GHP TA 2024



Sekolah Lapang GHP Provinsi Jawa Barat



Sekolah Lapang GHP Provinsi Sumatera Utara



Sekolah Lapang GHP Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 15. Dokumentasi Penerima Bantuan Sarana Pemasaran



Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan



Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan



Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 16. Dokumentasi Kegiatan Petugas PIP



Propinsi Aceh



Propinsi Riau



Propinsi Maluku



Kab. Sigi



Kab. Tojo Una Una, Propinsi Sultra



Propinsi Sumatera Barat



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekidthorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sugiharto
Jabatan : Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

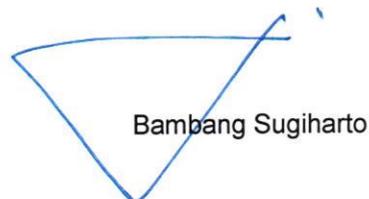
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua


Prihasto Setyanto

Pihak Pertama


Bambang Sugiharto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura	1-1	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	80,00 %
		1-2	Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura	5,00 %
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	2-1	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	365.918.784,00 US\$
		2-2	Peningkatan Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura	8,00 %
		2-3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	5,00 %

KEGIATAN

1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

ANGGARAN

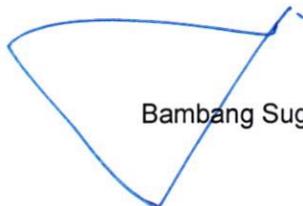
Rp. 125.811.622.000,00

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihasto Setyanto


Bambang Sugiharto



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekidthorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sugiharto
Jabatan : Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihasto Setyanto


Bambang Sugiharto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura	1-1	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	100 %
		1-2	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96 %
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	2-1	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	509.023.015 US\$
		2-2	Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura	14,32 %
		2-3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89 %
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	3-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

KEGIATAN

ANGGARAN

1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

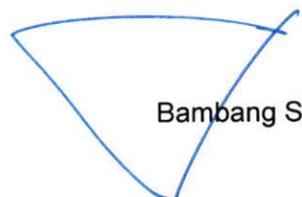
Rp. 125.811.622.000,00

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Prihasto Setyanto


Bambang Sugiharto



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hotman Fajar Simanjuntak

Jabatan : Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prihasto Setyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2024

Pihak Kedua

Prihasto Setyanto

Pihak Pertama

Hotman Fajar Simanjuntak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura	1-1	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	100 %
		1-2	Peningkatan Fasilitasi Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96 %
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	2-1	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	509.023.015 US\$
		2-2	Peningkatan Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura	14,32 %
		2-3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89 %
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	3-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

KEGIATAN

ANGGARAN

1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Rp. 125.811.622.000,00

Jakarta, Juli 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

Hotman Fajar Simanjuntak



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdhorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hotman Fajar Simanjuntak

Jabatan : Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua

Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Pertama

Hotman Fajar Simanjuntak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura	1-1	Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura yang sesuai peruntukkan	100 %
		1-2	Peningkatan Fasilitas Nilai Tambah Produk Hortikultura	4,96 %
2	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura	2-1	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	509.023.015 US\$
		2-2	Peningkatan Fasilitas Akses Pasar Hortikultura	14,32 %
		2-3	Pertumbuhan Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional	30,89 %
3	Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	3-1	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat PPHH	70 %
4	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	4-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	3,21 Skala Likert

KEGIATAN

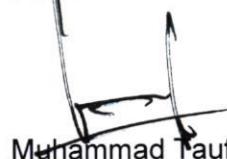
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

ANGGARAN

Rp. 125.811.622.000,00

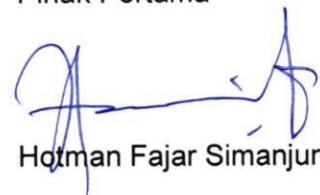
Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua



Muhammad Fauziq Ratule

Pihak Pertama



Hotman Fajar Simanjuntak

RENCANA KERJA TAHUNAN — 2024 —



Direktorat
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Hortikultura

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

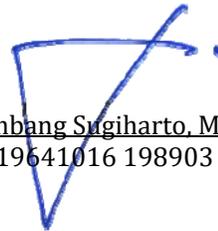
KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal Eselon II yang mengelola anggaran APBN diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagai instansi pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai perwujudan pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam mengelola APBN untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan tahun 2024.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2024 diharapkan dapat memandu semua pihak yang terkait baik pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktur,



Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc
NIP. 19641016 198903 1 002

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	7
D. Sasaran	8
E. Target Output/Keluaran	8
III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
A. Kebijakan	10
1. Kebijakan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	10
2. Kebijakan Pemasaran	12
3. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu	12
B. Strategi	13
C. Program	14
D. Kegiatan	14
1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura	14
2. Kegiatan Pemasaran	15
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu	17
IV. PENUTUP	21
Lampiran	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura dipayungi oleh Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010 yang diundangkan dengan tujuan agar potensi hortikultura dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura harus sejalan dengan Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura (2020-2024), *Blue Print* Pengembangan Hortikultura (2011-2025).

Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha *agro input* (hulu) kegiatan produksi (*on farm*) dan pascapanen, pengolahan (*processing*) serta pemasaran (*off farm*), dengan berorientasi pada peningkatan produksi, serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura. Wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau *value added* berada di tingkat petani dan usaha kelompok menjadi *profit center* di pedesaan.

Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah maka perlu ada penanganan pascapanen dan pengolahan produk hortikultura yang baik. Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses lagi. Selain penanganan pascapanen, pengolahan produk juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk segar hortikultura tersebut. Pengembangan pengolahan hasil hortikultura dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan

penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani, dan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan, serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan) dan disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar *off-grade* atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura, pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura secara efektif dan operasional difokuskan pada peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan daya saing dan ekspor baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu strategi yang dapat diformulasikan adalah dalam bentuk penerapan sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan atau tuntutan pasar. Untuk kebijakan standardisasi dan mutu hasil hortikultura, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan dan mutu produk. Dimana dalam perdagangan komoditas hasil hortikultura di era pasar bebas saat ini, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan.

Pemasaran komoditas hortikultura merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sub sektor hortikultura. Pemasaran produk hortikultura diarahkan

untuk pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran baik dalam negeri, dan ekspor (luar negeri).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, perlu merumuskan rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat jenderal Hortikultura dan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam rangka perencanaan kinerja pada tahun 2024, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada periode 2020-2024, yaitu :

1. Mengembangkan produk hortikultura yang aman, bermutu dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil hortikultura melalui pengembangan diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Menguatkan kelembagaan kelompok/gapoktan dan koperasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sub sektor hortikultura.
4. Meningkatkan nilai investasi sub sektor hortikultura.
5. Mendorong penguasaan produk nusantara terhadap pasar domestik.
6. Meningkatkan sarana dan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura.
7. Meningkatnya kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha dan sinergi antar instansi terkait.
8. Meningkatnya promosi dalam dan luar negeri.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
4. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045
5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024
9. Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2020-2024
10. Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2020-2024
11. Blue Print Pengembangan Hortikultura 2011-2025
12. Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2020-2024

II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam RKT 2024 tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu :

A. Visi

Mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani", maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **"Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas"**.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, diemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menumbuhkembangkan UMKM Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan, fasilitasi pengembangan usaha dan kelembagaan, dukungan pemasaran, serta fasilitasi penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu mutu bahan baku dan produk segar/olahan hortikultura.
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.
3. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tanggal 13 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam operasional kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilaksanakan oleh 4 (empat) Kelompok Substansi dan 1 (satu) Subbagian sesuai tugas dan fungsi yang merujuk pada Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil;
2. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu;
3. Kelompok Pemasaran Hortikultura;
4. Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan;
5. Subbagian Tata Usaha

Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura.

Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu hortikultura.

Kelompok Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hortikultura.

Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan usaha dan kelembagaan.

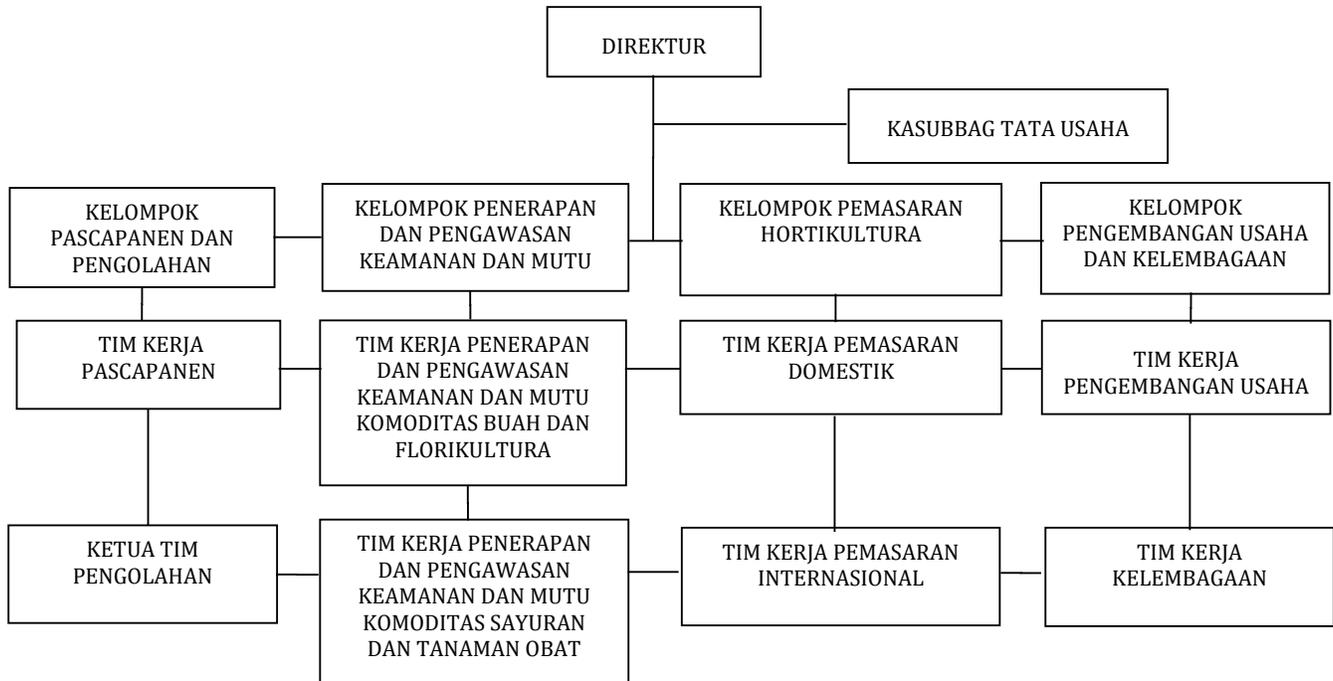
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

C. Tujuan

1. Menumbuhkan UMKM hortikultura.
2. Mengembangkan usaha dan kelembagaan di bidang hortikultura.
3. Meningkatkan pemasaran hasil hortikultura yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan standar mutu hasil hortikultura.
5. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tergambar pada bagan sebagai berikut :

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA



D. Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya.
2. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
3. Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
4. Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
5. Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.
6. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.

E. Target Output/Keluaran

Target Output/Keluaran kegiatan yang ingin dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura di tahun 2024 adalah :

1. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura

2. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan
3. Promosi Produk Hortikultura
4. Peraturan/Norma/Pedoman
5. Kelompok yang Terlatih GAP
6. Kelompok yang Terlatih GHP
7. Informasi Pasar Komoditas Hortikultura
8. Sertifikat Produk Hortikultura
9. Sarana Pascapanen hortikultura
10. Sarana Pengolahan Hortikultura
11. Sarana Pemasaran Hortikultura
12. Prasarana Pascapanen Hortikultura
13. Prasarana Pengolahan Hortikultura
14. *Horticulture Development of Dryland Areas Project* *)

III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sarana, dan memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk hortikultura untuk siap jual.

Dalam penanganan pascapanen komoditas hortikultura, secara umum meliputi kegiatan mulai dari pendataan jumlah produk siap panen, pengumpulan, sortasi, *trimming*, pembersihan, penirisan, pengkelasan (*grading*), pengemasan atau pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sampai cara pengiriman dan distribusinya. Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan sarana dan prasarana pascapanen yang memadai seperti bangsal pasca panen, *cold storage* dan perlengkapannya, alat pengangkutan dari lahan usaha ke *packinghouse*, dan lain-lain.

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk *klaster* (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan klaster, dimana kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi.

Dengan demikian, pengembangan agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya usaha-usaha agroindustri pedesaan yang responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk : (1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; (2) memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.

Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil hortikultura, serta telah memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik (*zero waste*). Usaha agroindustri tersebut merupakan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil-menengah dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan minuman, biofarmaka, *bioenergy*, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis;

mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.

2. Kebijakan Pemasaran

Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk hortikultura Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di seluruh propinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran dan investasi dilaksanakan dengan pengembangan jaringan pemasaran domestik, pengembangan sarana pemasaran melalui pasar tani dan/atau pasar lelang, kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi pasar.

PIP bertujuan untuk menciptakan sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar.

Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Di samping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan

pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah peningkatan negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan diseminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar komoditi segar/ produk olahan ekspor, pengembangan *market intelligence* dan database dan penguatan rantai pasok.

3. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu

Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu. Kebijakan standardisasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura dari proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan standar mutu secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sistem berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standardisasi dan mutu dilaksanakan melalui bimbingan teknis penerapan GHP (*Good Handling Practices*), Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura, dan Sertifikasi dan Standardisasi Produk Hortikultura.

B. Strategi

1. Penerapan dan pengawasan standar mutu komoditi strategis dan keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian.
3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis.

C. Program

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan penyederhanaan program lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura yang sesuai dengan redesign tersebut, maka program Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **“Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”** yang mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian yaitu “Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional” serta mendukung sasaran strategis “Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan”.

D. Kegiatan

1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura

Menurut survei Bank Indonesia (BI), hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertanian yang masih tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19, yaitu sebesar 16,7 persen di akhir 2020. Sementara, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi (-17,9 persen), perdagangan (-3,2 persen), real estate (13,0 persen), dan jasa kemasyarakatan (2,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor UMKM pertanian terbuka lebar, salah satunya sub sektor hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Program penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar off-grade atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Fasilitasi bantuan tersebut berupa Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura dalam bentuk bangunan bangsal pascapanen, dan untuk beberapa komoditas dapat dilengkapi dengan bangunan pengering tenaga surya/solar dryer. Dalam konsep pengembangan UMKM, bangunan bangsal pascapanen mencakup area penanganan pascapanen hortikultura segar dan area pengolahan produk hortikultura.

Bangunan bangsal pascapanen akan dilengkapi dengan sarana/alat pascapanen yang ditujukan untuk mendukung penanganan pascapanen produk segar dan penanganan produk yang akan diolah. Sarana pascapanen dapat berupa sarana angkutan (motor roda 3, angkutan roda 4), keranjang panen, sarana pencucian, roller conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, meja peniris, meja sortasi/packing, dan lain-lain.

Bangunan bangsal pascapanen juga dilengkapi dengan sarana/alat pengolahan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hortikultura serta penanganan produk segar pada saat over supply. Sarana pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah sesuai komoditas yang akan diolah dengan sudah ditentukan jenis end product hasil olahannya.

2. Kegiatan Pemasaran

Pengembangan pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan produk hortikultura dan akses pasar luar negeri terkait dengan peningkatan ekspor. Beberapa kebijakan yang sudah ada perlu dioptimalkan dalam implementasinya, seperti pengembangan Pasar Tani, kerjasama kemitraan. Di samping itu, pemantauan harga perlu didukung informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, up to date, dan kontinyu. Hal ini tidak saja didukung sistem informasi pemasaran yang berkualitas, namun juga Petugas Pelayanan Informasi Pasar (Petugas PIP) yang dapat berkinerja dengan baik. Selain itu, perlu didukung kegiatan dalam rangka meningkatkan ekspor produk hortikultura seperti promosi dan pameran.

Dalam rangka mendukung pengembangan akses pemasaran langsung dari petani/kelompok tani produsen produk hortikultura, maka melalui penyelenggaraan kegiatan Gelar Pasar Tani diantaranya dengan menyediakan produk hortikultura berkualitas dengan harga terjangkau langsung dari petani/pelaku usaha sayur, buah segar dan produk hortikultura olahan. Pelaksanaan promosi Gelar Pasar Tani diharapkan masyarakat dapat membeli produk hortikultura berkualitas dan harganya terjangkau. Gelar Pasar Tani di beberapa wilayah/daerah sangat membantu petani/pelaku usaha produk Hortikultura dalam memasarkan produknya secara langsung sampai ke konsumen.

Produk hortikultura merupakan produk yang mudah rusak (perishable) dengan harga yang fluktuatif. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga antara lain:

- Panjangnya rantai pemasaran, kendala transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas pangan
- Transportasi sering menyebabkan produksi hortikultura dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata dan kontinu oleh konsumen di daerah non sentra sehingga disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah
- Penerapan teknologi produksi dan faktor kebijakan pemerintah menyebabkan meningkatnya harga input/sarana produksi.
- Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Karena itu diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen.

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas, Ditjen Hortikultura melalui Direktorat PPHH memfasilitasi beberapa kegiatan antara lain:

- Kegiatan Pasar Tani melalui pemanfaatan Sarana Pemasaran memberikan berbagai manfaat, seperti petani dapat menjual produknya secara langsung, memperoleh kepastian harga, menikmati harga tertinggi dari semua penawar, menerima cash and carry, tercapai stabilitas harga, tercipta one region one price, memotong 2 - 3 rantai pasok, tata kelola yang efisien, transparan dan berimbang. Kegiatan Pasar Tani selama ini memberikan kontribusi yang besar dalam memasarkan produk hortikultura secara langsung kepada konsumen,

dengan operasional lebih ke mobile (berpindah-pindah) di lokasi strategis untuk menjangkau pemasaran produk hortikultura. Pemasaran juga dilakukan secara online dan offline.

- Petugas Pelayanan Informasi Pasar bertujuan memberikan informasi dalam membuat kebijakan pemasaran komoditas hortikultura dan memperlancar arus perdagangan antar pulau/provinsi. Ketersediaan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
- Kegiatan fasilitasi promosi produk hortikultura dilakukan melalui gelar produk hortikultura dalam bentuk pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan memasyarakatkan produk hortikultura. Selain itu melakukan forum komunikasi, koordinasi serta forum bisnis di berbagai event dengan Kementerian/Lembaga terkait.

3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui Standard Operational Procedure (SOP) untuk menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP/SOP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas.

Selain sebagai bukti penerapan GAP/SOP, nomor registrasi kebun dan lahan usaha saat ini digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor. Kebun dan lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi tersebut siap untuk ditindaklanjuti dengan sertifikasi seperti Sertifikasi GAP, Sertifikasi Organik, maupun standar jaminan mutu lainnya.

Untuk pencapaian pengembangan penerapan jaminan mutu dan sistem standardisasi mutu komoditas hortikultura, maka perlu adanya Fasilitasi kegiatan standardisasi produk, pembinaan kelompok masyarakat dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan komoditi hortikultura. Kegiatan ini harus

melibatkan pembina mutu atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Tabel 1. Matrik Penanggung Jawab, Output, Kode Output, dan Pembina Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pusat Tahun 2024

No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Direktorat PPHH
A	Dekonsentrasi/ TP Mandiri (Kabupaten/Kota)	Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	018.04.EC.5887.BMA.030	Kelompok Pemasaran
			2 Kelompok Tani terlatih GAP	018.04.EC.5887.QDD.021	
			3 Kelompok Tani terlatih GHP	018.04.EC.5887.QDD.022	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu
B	Tugas Pembantuan	Dinas Pertanian Provinsi / Kabupaten	1 Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil
			2 Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	
			3 Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010	
C	Pusat	Ditjen Hortikultura/ Dit. PPHH	1 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	018.04.EC.5887.ADA.010	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu
			2 Kelompok Tani terlatih GAP	018.04.EC.5887.QDD.021	
			3 Kelompok Tani terlatih GHP	018.04.EC.5887.QDD.022	
			4 Sertifikat Produk Hortikultura	018.04.EC.5887.PDC.010	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu (Sertifikasi Organik) dan Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan

No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Direktorat PPHH
					(Sertifikasi HCCAP)
5			Promosi Produk Hortikultura	018.04.EC.5887.AEH.020	Kelompok Pemasaran
6			Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil
7			Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	
8			Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010	
9			Prasarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.011	
10			Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	018.04.EC.5887.AEA.020	Direktorat PPHH
11			Peraturan/Norma/Pedoman	018.04.EC.5887.AFA.021	Direktorat PPHH
12			Horticulture Development of Dryland Areas Project (PLN)	018.04.EC.5887.RAI.011	Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana kerja tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura pada tahun 2024. Dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan masukan dari berbagai pihak.

Dengan adanya rencana kerja tahunan ini diharapkan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dapat dilaksanakan lebih terarah, berjalan efektif, efisien dan terukur, serta akan tercapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN AWAL 2024 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Unit
	2.	Sertifikat Produk Hortikultura	100	Produk
	3.	Penerapan GAP	110	Produk
	4.	Penerapan GHP	40	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	30	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	20	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 ANGGARAN REVISI 1 TAHUN 2024
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Unit
	2.	Sertifikat Produk Hortikultura	100	Produk
	3.	Penerapan GAP	110	Produk
	4.	Penerapan GHP	40	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	30	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	40	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit



KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <https://pertanian.go.id>

Nomor : B-42/RC.330/A.1/01/2025 8 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja
lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
 2. Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian
- di
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II/UPT Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pada Laporan Kinerja 2024 didasarkan pada Perjanjian Kinerja terbaru Pimpinan Unit Kerja yang telah ditandatangani;
2. Capaian kinerja menggunakan data-data dan informasi terkini yang tersedia baik menggunakan angka tetap, angka sementara, angka proyeksi atau sesuai dengan ketersediaan data dan merupakan data resmi;
3. Laporan Kinerja disusun berdasarkan outline sesuai PermenPAN RB Nomor 53/2014 sebagaimana **Lampiran 1**;
4. Tahun 2024 merupakan akhir periode pembangunan jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian kinerja perlu ditampilkan secara *series* dari tahun 2020-2024;
5. Capaian kinerja indikator persentase capaian nilai reformasi birokrasi (CNRB) dihitung dengan menggunakan:
 - a. Nilai capaian indikator komponen tahun 2024 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator Internal yang menilai komponen RB level unit kerja.
 - b. Jika nilai indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) **belum dirilis** oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2023.
 - c. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) untuk level unit kerja **tidak dihitung** akibat perubahan regulasi dan/ atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan

nilai capaian indikator komponen tahun 2024 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.

Detil capaian indikator komponen CNRB dapat dilihat pada **Lampiran 2**;

6. Capaian indikator RB tematik pengendalian inflasi belum dirilis nilainya pada tahun 2024, sedangkan nilai pada tahun 2023 adalah 0. Untuk itu, capaian pada tahun 2024 dapat ditulis N/A (*Not available*) dan tidak diperhitungkan pada capaian CNRB. Dalam penjelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bab III, agar tetap dijelaskan terkait pelaksanaan mendukung pengendalian inflasi sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.
7. Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada **Lampiran 3**.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya tim penyusun Lakin setiap unit kerja agar segera menindaklanjuti dengan menghitung capaian kinerja dan menyusun Lakin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Perencanaan,



Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002

Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal

Lampiran 1.

OUTLINE LAPORAN KINERJA (PERMENTAN 53/2014)

1. Kata Pengantar

Bagian yang **ditandatangani oleh penanggungjawab organisasi** dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang bersangkutan.

2. Ikhtisar Eksekutif

- Pada bagian ini **disajikan tujuan, sasaran dan capaiannya** dalam PK serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
- Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

3. BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan **hal-hal umum ttg instansi** seperti **dasar hukum** pembentukan instansi, **struktur organisasi** instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, kondisi demografi instansi, sumber daya serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi yang bersangkutan, **serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.**

4. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- Berisi uraian singkat tentang **rencana strategis organisasi** (visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program) Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra.
- Pada bagian berikutnya disajikan **kinerja yang diperjanjikan** akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui dan **dijelaskan dinamikanya**

5. BAB III. Akuntabilitas Kinerja

• Pengukuran kinerja

Pada bagian awal bab ini terlebih dahulu disajikan **capaian kinerja setiap sasaran** secara keseluruhan dan masing-masing sasaran harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Misalkan suatu instansi mempunyai 8 sasaran, maka dalam bagian ini mesti diungkapkan berapa sasaran yang berhasil dan berapa sasaran yang gagal dicapai baik karena dinamika lingkungan startegis maupun dinamika lingkungan internal (diantaranya

perubahan alokasi anggaran, blokir *Automatic adjustment*, blokir *non Automatic Adjustment* dan atau blokir penghematan perjalanan dinas

- **Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja**
 - Pada bagian ini diuraikan hasil **evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja**, faktor penyebab **keberhasilan atau kegagalan** capaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
 - Sistematis pembahasan dalam bagian agar **menguraikan analisis akuntabilitas kinerja setiap sasaran** satu per satu.
 - **Perbandingan** dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan: target PK, capaian tahun lalu, Renstra, RPJMN/standar nasional (jika ada)
 - **Analisis**: kegagalan/keberhasilan serta alternatif solusi yang dilakukan; efisiensi penggunaan sumber daya; program/kegiatan yang menunjang pencapaian
- Capaian Kinerja Lainnya berupa prestasi, dan capaian strategis lainnya
- Realisasi Anggaran

6. BAB IV. Penutup

Pada bagian ini dikemukakan **simpulan umum tentang keberhasilan/kegagalan**, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah, dan **langkah di masa mendatang** yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

- Struktur Organisasi
- Data Kepegawaian
- Rencana (PK) dan Realisasi Anggaran
- Penjelasan-penjelasan tambahan
- Perhitungan-perhitungan, dan gambar,
- Data pendukung yang relevan

Catatan:

Khusus BSIP agar:

1. Membuat narasi terkait kegiatan BSIP dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian melalui Persentase Penerapan Standar Instrumen Pertanian (1 halaman lengkap dengan foto)
2. Pada penyusunan Laporan Kinerja BSIP dibuat sesuai PK terakhir, meskipun berbeda dengan Renstra Kementerian Pertanian Rev. 2, bandingkan hasil capaian 2024 dengan tahun sebelumnya.

Lampiran 2. Capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2023-2024

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
A		Sekretariat Jenderal		
		Biro Organisasi dan Kepegawaian		
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,5	Menggunakan capaian tahun 2023
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	89,37	Menggunakan capaian tahun 2023
	3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	99,92	Menggunakan capaian tahun 2023
	4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4	Menggunakan capaian tahun 2023
	5	Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	273,5	273,5
	6	Indeks Pelayanan Publik	4,59	4,69
	7	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	91,45	87,94
	8	Indeks BerAkhlak	63,9	68,8
	9	Survei Kepuasan Masyarakat	88,73	90,39
		Biro Perencanaan		
	10	Nilai SAKIP	74,05	Menggunakan capaian tahun 2023
	11	Indeks Perencanaan Pembangunan	81,26	91,03
	12	Capaian Prioritas Nasional	97,5	98,63
	13	Capaian IKU	93,75	Menggunakan capaian tahun 2023
		Biro KBMN		
	14	Tingkat Maturitas SPIP	2,99	8,84
	15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	16	Indeks Pengelolaan Aset	2,76	Menggunakan capaian tahun 2023
	17	Opini BPK	WTP	WDP
		Biro UP		

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
	18	Tingkat Digitalisasi Arsip	96,84	96,97
	19	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,83	69,41
	20	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,51	Menggunakan capaian tahun 2023
		Biro Hukum		
	21	Indeks Reformasi Hukum	77,97	99,4
		Biro Hukum dan PSEKP		
	22	Indeks Kualitas Kebijakan	66,08	66,08
		Pusdatin		
	23	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	Menggunakan capaian tahun 2023
	24	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,12	69,41
	25	Indeks SPBE	3,86	Menggunakan capaian tahun 2023
		Cascade dari Itjen		
	26	Survei Penilaian Integritas	66,79	Menggunakan capaian tahun 2023
	27	Tindak Lanjut Rekomendasi	83,8	85
		PPVTPP		
		Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
B		Inspektorat Jenderal		
	1	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (Itjen)	1	1
	2	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Itjen)	2	Menggunakan capaian tahun 2023
	3	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	66,79	Menggunakan capaian tahun 2023
	4	Tindak Lanjut Rekomendasi (Itjen)	83,8	85
	5	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	6	Nilai SAKIP (Biro Ren)	90,6	90,78
	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	95,07	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	8	Capaian IKU (Biro Ren)	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
	9	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
C		Ditjen PSP		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	90,91	91
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	83,24	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU (Biro Ren)	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi (Itjen)	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
	11	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB
D		Ditjen Horti		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	83,58	85,72
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	85,92	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU (Biro Ren)	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi (Itjen)	Diambil dari hasil	Diambil dari hasil pengukuran TLHP

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
			pengukuran TLHP Itjen	Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	9	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
	11	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB
E		Ditjen TP		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	87	88,77
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	85,12	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	9	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
	10	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
	11	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	0,94	Menggunakan capaian tahun 2023
	12	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB
F		Ditjen Bun		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	85,2	87,7
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	84,87	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	9	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
	10	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
	12	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB
G		Ditjen PKH		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
			oleh Itjen	
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	80,05	80,33
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	87,93	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	9	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
	10	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
	12	Pengendalian Inflasi	0	Tidak diperhitungkan dalam capaian CNRB
H		BSIP		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	86,54 (Litbang)	83,14
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	90,84	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	10	Realisasi Investasi	1,5	Menggunakan capaian tahun 2023
I		BPPSDMP		
	1	Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN)	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen	Diambil dari hasil penilaian mandiri SPI oleh Itjen
	2	Nilai SAKIP (Biro Ren)	83,01	84,07
	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)	94,09	Diambil dari hasil pengukuran melalui emonev Kemenkeu
	4	Capaian IKU	Diambil dari rata-rata Capaian PK	Diambil dari rata-rata Capaian PK
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen	Diambil dari hasil pengukuran TLHP Itjen
	6	Indeks BerAkhlak (Biro OK)	-	Diambil dari capaian Kementan, sebesar 68,8
	7	Survei Penilaian Integritas (Itjen)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)	Diambil dari hasil penilaian oleh Itjen (Ir Inves)
	8	Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OK)	Diambil dari penilaian Biro OK	Diambil dari penilaian Biro OK
	9	Pengentasan Kemiskinan	0,96	Menggunakan capaian tahun 2023
J		Unit Pelaksana Teknis Kementan		
	1	Nilai Pembangunan ZI (Berdasarkan LKE); 60 Pengungkit dan 40 Hasil	Menggunakan hasil penilaian mandiri oleh	Menggunakan hasil penilaian mandiri oleh Itjen maupun

No.		Unker/ Indikator	Capaian	
			2023	2024
1	2	3	4	5
			Itjen maupun UPT(silang)	UPT(silang)

Lampiran 3. Waktu Penyampaian Laporan Kinerja

No	Jenis Laporan	Pelapor	Penerima Laporan	Waktu Penyampaian
a.	Lakin Kementerian Pertanian	Menteri Pertanian	Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas	28 Februari (t+1)
b.	Lakin UK Eselon I	Eselon I	Menteri Pertanian	15 Februari (t+1)
c.	Lakin UK Eselon II dan UPT Pusat	Eselon II/Kepala UPT Pusat	Eselon I	31 Januari (t+1)

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Biro Perencanaan,



Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002



NOTA DINAS

Nomor : 158/KP.340/D.1/01/2024

Yth : Direktur lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Hal : Target Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

Sehubungan telah dilaksanakannya reuiu Matrik Peran Hasil lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2023, tim pengelola satuan kerja agar memastikan target sasaran kinerja tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023;
- Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing Direktur agar melihat capaian IKI tahun 2023 yang melebihi target di PK 2024;
- Berdasarkan surat Plt. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian nomor B-363/KP.340/A2/01/2024 tanggal 14 Januari 2024 hal Sasaran Kinerja Pegawai, pada angka 5 disebutkan bahwa dilakukan perubahan sementara untuk rating dan umpan balik berkelanjutan hasil kerja sebagai berikut:

Rating Hasil Kerja	Umpan Balik Berkelanjutan
Diatas Ekspektasi	Realisasi melampui target kinerja, tidak terjadi senjangan kinerja, memberikan kontribusi langsung kepada organisasi dan siap menanggung resiko bersama jika dikemudian hari ditemukan manipulasi kinerja
Sesuai Eskpektasi	Realisasi melampui atau masuk dalam batasan realisasi sebesar 80%-100% dan memberikan dampak positif untuk organisasi
Dibawah Ekspektasi	Realisasi dibawah target kinerja dan terdapat kesengajaan dalam kegagalan pencapaian target kinerja

- Modul SINERGI 2024 belum dibuka Biro Organisasi dan Kepegawaian sampai Berita Acara Reuiu Matrik Peran Hasil Tahun 2024 ditindaklanjuti eselon I;
- Pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari akan dilaporkan pada tanggal 1-5 Februari 2024, sehingga Direktorat Jenderal Hortikultura agar segera menindaklanjuti hasil BA Reuiu MPH Tahun 2024, dengan memperbaiki target di MPH Tahun 2024;

6. Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, salah satunya adalah melakukan reuiu atas target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja di level pusat hingga unit kerja teknis di daerah dengan memperhatikan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan kondisi eksisting kinerja menuju masa akhir Renstra sehingga target yang dimiliki telah berdasarkan pada kondisi kinerja yang riill dan sesuai dengan kebutuhan;
7. Dalam rangka percepatan entry SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura, dan sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada poin 6, direktorat agar mencermati kembali dan menyesuaikan kembali target PK dan selanjutnya target MPH Tahun 2024 sampai cascading ke bawah karena capaian kinerja 80% - 100% masih masuk range Sesuai Ekspektasi sebagaimana point 1 dan 3;
8. Penyesuaian target IKI pada MPH Tahun 2024 masing-masing direktorat agar dapat kami terima kembali paling lambat 30 Januari 2024 untuk percepatan entry SKP 2024 di modul SINERGI 2024;
9. Apabila realisasi di triwulan II ada kemungkinan tidak tercapai, maka target kinerja pada SKP 2024 akan ditinjau kembali.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh,



Muhammad Taufiq Ratule

Tembusan:
Direktur Jenderal Hortikultura



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-364 /KP.340/A2/01/2024
Lampiran : -
Hal : Sasaran Kinerja Pegawai

19 Januari 2024

Yth. 1. Kepala Biro/ Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen/ Itjen/ Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Pertanian.

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-87/RC.030/A1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 bahwa penetapan kategori capaian kinerja organisasi di dalam laporan kinerja dapat merujuk kepada Surat Edaran Sekretaris Jenderal No 1003 Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyelaraskan capaian kinerja organisasi dengan kinerja pegawai dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan hasil koordinasi dengan Tim Kerja Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur maka diperlukan penyelarasan kategori capaian kinerja organisasi yang akan tercantum dalam dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) sebagai berikut:

Kriteria Nilai	Predikat Kinerja Organisasi	
	SE Sekjen No. 1003 Tahun 2023	SE Menpan No. 3 Tahun 2023
> 100%	Sangat Berhasil	Istimewa
80% – 100%	Berhasil	Baik
60% – < 80%	Cukup Berhasil	Butuh Perbaikan
< 60%	Kurang Berhasil	Kurang

2. Kategori capaian kinerja organisasi untuk dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) menggunakan predikat kinerja organisasi berdasarkan SE Menpan No. 3 Tahun 2023 dengan kriteria nilai sebagaimana tercantum dalam angka 1 diatas.
3. Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 bahwa dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan SKP

bagi pejabat pimpinan tinggi dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) maka capaian PK selaras dengan capaian SKP pimpinan.

4. Capaian kinerja organisasi dalam sasaran kinerja pegawai menjadi dasar distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan SE Menpan Nomor 3 Tahun 2023.
5. Dengan mempertimbangkan angka 1 sampai dengan angka 4 di atas perlu dilakukan perubahan sementara untuk rating dan umpan balik berkelanjutan hasil kerja sebagai berikut:

Rating Hasil Kerja	Umpan Balik Berkelanjutan
Diatas Ekspektasi	Realisasi melampaui target kinerja, tidak terjadi senjangan kinerja, memberikan kontribusi langsung kepada organisasi dan siap menanggung resiko bersama jika dikemudian hari ditemukan manipulasi kinerja
Sesuai Ekspektasi	Realisasi melampaui atau masuk dalam batasan realisasi sebesar 80% – 100% dan memberikan dampak positif untuk organisasi
Dibawah Ekspektasi	Realisasi dibawah target kinerja dan terdapat kesengajaan dalam kegagalan pencapaian target kinerja

6. Rating dan Umpan Balik Berkelanjutan Hasil Kerja sebagaimana nomor 5 di atas mulai digunakan untuk pengukuran kinerja Triwulan IV dan Tahunan 2023.
7. Kami harapkan Saudara dapat memberikan arahan kepada seluruh pejabat penilai kinerja di masing – masing unit kerja untuk melakukan penilaian kinerja dengan baik dan benar.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,

Indria Fitriani, SH., MAP.
NIP 197211061999032002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL REVIU MATRIKS PERAN HASIL LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No.	Satuan Kerja	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 3. Pejabat fungsional ahli jenjang utama dan madya non penugasan manajerial sebagai ketua kelompok/ koordinator dan ketua tim kerja/ subkoordinator agar menambahkan indikator kinerja Jumlah Risalah Kebijakan (<i>Policy Paper</i>) di Bidang (d disesuaikan dengan substansi yang akan ditulis) yang Dimanfaatkan; 4. Penghentian PMPRB, IKI terkait PMPRB masih menunggu penetapan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3 berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 3. Tambah IKI Jumlah Risalah Kebijakan (<i>Policy Paper</i>) di Bidang (d disesuaikan dengan substansi yang akan ditulis) yang Dimanfaatkan;
2.	Direktorat Perbenihan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 3. Produksi Benih Umbi/Rimpang (ton) target belum ada; 	<ol style="list-style-type: none"> berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 3. Target dicantumkan
3.	Direktorat Perlindungan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 3. IKI terkait Serangan OPT masih menunggu penetapan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3 berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023
4.	Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3 berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar

			daripada realisasi kinerja tahun 2023
5.	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3 berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023
6.	Direktorat Buah dan Florikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Review Biro OK hanya melakukan review untuk MPH Level 1. 2. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementan Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola kinerja satker agar melakukan review level 2 dan level 3 berdasarkan cascading level 1 2. Tim pengelola kinerja satker agar memastikan Kembali target realisasi tahun 2024 lebih besar daripada realisasi kinerja tahun 2023

MATRIK KINERJA DITJEN HORTIKULTURA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target PK rev 3	Target PK Awal	Target PK REV 1
			2021	2022	2023	2023	2024	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS								
	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis dalam Negeri							
	Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	2,72	4,93	0,74	1,93	1,99	1,00
	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	14,08	9,68	-1,73	3,56	4,50	1,00
	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas							
	c. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	%	99,3	99,61	99,4	95,5	96	99,6
	d. Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	80,99	74,65	92,82	50,5	51	93,1
	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan							
	Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	88,41	95,3	95,42	92,5	95	95,7
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI								
	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian							
	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	96,25	93,79	94,12	85	85	94,4
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian							
	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	9,95	(0.34)	5,18	3	3	5,2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	33,08	33,78	33,78	32,07	32,15	rice
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	85,28	86,07	87,59	82	83	87,8

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target PK rev 3	Target PK Awal	Target PK REV 1
			2021	2022	2023	2023	2024	2024
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS								
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat								
	Meningkatnya produksi komoditas strategis hortikultura							
	Produksi cabai	Ton	2.747.018,0	3.020.262,1	3.047.938	2.933.637	3.001.111	3.078.417
	Produksi bawang merah	Ton	2.004.590,4	1.982.360,2	1.982.304	1.716.091	1.741.766	2.002.127
	Produksi bawang putih	Ton	45.091,6	30.582,3	40.042	45.458	45.912	40.442
	Meningkatnya produksi hortikultura unggulan							
	1. Produksi kentang	Ton	1.361.064,0	1.503.998,3	1.218.412	1.388.440	1.416.209	1.230.596
	2. Produksi sayuran lain***	Ton	8.646.011,6	8.733.223,9	8.244.258	8.939.000	9.282.600	8.326.701
	3. Produksi tanaman obat	Ton	616.833,2	572.626,1	535.695	521.950	538.756	541.052
	**** Produksi sayuran sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya						3,10	
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura								
	Meningkatnya produksi hortikultura unggulan							
	1. Produksi pisang	Ton	8.741.146,7	9.245.427,1	9.511.613	8.452.600	8.934.400	9.606.729
	2. Produksi mangga	Ton	2.835.442,34	3.308.894,67	3.129.943	3.108.700	3.285.900	3.161.242
	3. Produksi durian	Ton	1.353.037,01	1.582.171,83	1.750.060	1.290.000	1.363.500	1.767.561
	4. Produksi alpukat	Ton	669.260,46	865.780,16	933.650	577.500	610.400	942.987
	5. Produksi buah Lain***	Ton	12.985.328,02	28.175.535,04	12.559.313	13.266.800	14.023.200	12.684.906
	6. Produksi florikultura tangkai***	Tangkai	626.444.746,00	717.949.383,00	758.658.428	739.488.000	780.159.700	766.245.012
	7. Produksi florikultura Non-Tangkai	Pohon				54.224.200	57.206.900	
	*** Produksi buah sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya						5,7	
	*** Produksi florikultura sesuai amanat RPJMN juga dihitung peningkatan produksinya						5,5	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target PK rev 3	Target PK Awal	Target PK REV 1
			2021	2022	2023	2023	2024	2024
Perbenihan Hortikultura								
	Tersedianya perbenihan hortikultura bermutu terhadap kebutuhan							
	Produksi benih umbi / rimpang	Ton	12.155	11.711	13.501,42	11.012	11.128	13.636
	Produksi benih batang	Batang	7.854.302	7.538.154	10.141.913	6.402.424	6.466.424	10.243.332
	Peningkatan sertifikasi benih hortikultura	%	42,17	38	4,7	2	2	5
	<i>Prasarana dan sarana perbenihan hortikultura</i>	Unit	2	45	1	29	31	
Perlindungan Hortikultura								
	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura							
	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	99,3	99,61	99,4	95,50	96,00	99,65
	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI							
	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	80,99	74,65	92,82	50,5	51	93,05
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI								
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura								
	Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura							
	Rasio Ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil Hortikultura yang sesuai peruntukan	%	102,5	100,66	100	80,5	81	100,05
	Peningkatan Fasilitasi nilai tambah produk hortikultura	%	7	12,82	4,95	5,5	6	4,96
	Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura							
	Nilai ekspor untuk produk hortikultura	US\$	466.356.422,6	460.663.122,5	483.862.182	355.260.955	365.918.784	509.023.015,5
	Peningkatan fasilitasi akses pasar hortikultura	%	14	0	14,28	8	8	14,32
	Pertumbuhan jaminan mutu produk hortikultura nasional	%	100	(23,22)	30,81	5	5	30,89

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target PK rev 3	Target PK Awal	Target PK REV 1
			2021	2022	2023	2023	2024	2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	33,08	33,78	33,78	32,07	32,15	rice
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	85,28	86,07	87,59	82	83	87,81
Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura								
	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	33,08	33,78	33,78	32,07	32,15	
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura	Level	3,72	3,8	3,96	3	4	3,97
	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura	%	100	85,71	100	86	86	100,00
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal	%	80,6	86,11	94,96	82	84	95,20
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura							
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala Likert	2,89	2,93	3,2	3,19	3,21	3,21
	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala Likert	3,33	3,39	3,56	3,75	3,75	3,57
	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat yang efektif, efisien dan akuntabel							
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	Skala Likert (1-4)	3,16	3,14		3,19	3,21	
	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Buah dan Florikultura yang efektif, efisien dan akuntabel							
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Buah dan Florikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Buah dan Florikultura	Skala Likert (1-4)	-	3,17		3,19	3,21	
	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbenihan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel							
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Hortikultura	Skala Likert (1-4)	-	-		3,19	3,21	
	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel							
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura	Skala Likert (1-4)	-	3,5		3,19	3,21	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Realisasi			Target PK rev 3	Target PK Awal	Target PK REV 1
			2021	2022	2023	2023	2024	2024
	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel							
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Skala Likert (1-4)	-	-		3,19	3,21	
	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas							
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	85,28	86,07	87,59	82	83	



**Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Direktorat Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520**